

**ANALISIS LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK PADA  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)  
KABUPATEN BANTAENG**

**SKRIPSI**



**ALAM NURSANDI  
NIM 105731105518**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR**

**2022**

**KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA**

**JUDUL PENELITIAN:**

**ANALISIS LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK PADA  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)  
KABUPATEN BANTAENG**

**SKRIPSI**

**Disusun dan Diajukan Oleh:**

**ALAM NURSANDI**

**NIM: 105731105518**

**Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Akuntansi Pada Program Studi Akuntansi Fakultas  
Ekonomi Dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2022**

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

**Dan Tuhanmu Berfirman : Berdoalah kepadaku niscaya aku akan  
perkenankan bagimu (Q.S Gafir : 60)**

**Sungguh yang membuat kita kuat adalah doa, dan yang membuat kita maju  
adalah usaha**

### **PERSEMBAHAN**

**Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas Rahmat dan Karunianya  
sehingga skripsi ini telah terselesaikan dengan baik.**

**Alhamdulillah Rabbil'alamin**

**Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua, ayahanda dan  
ibunda, beserta keluarga besar tercinta, sebagai rasa hormat dan baktiku,  
terimah kasih atas segala doa dan kasih sayang yang telah engkau berikan  
yang tak ada hentinya, dan almamater biru Universitas Muhammadiyah**

**Makassar**

### **PESAN DAN KESAN**

**“Jangan pernah takut dengan masalah yang akan kamu hadapi,  
sesungguhnya allah tidak membebani seorang hamba melainkan dari batas  
kesanggupannya.”**



PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411)866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik Pada Badan  
Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bantaeng.

Nama Mahasiswa : Alam Nursandi

No. Stambuk/NIM : 105731105518

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa penelitian ini telah diperiksa, dan diujikan didepan panitia  
penguji Skripsi strata (S1) pada tanggal 13 Agustus 2022 di Program Studi  
Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 13 Agustus 2022

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Nasrullah. SE., MM  
NIDN: 0914049104

  
Wahyuni. SE., M.Ak  
NIDN: 0920079201

Mengetahui

Ketua Program Studi

  
H. Andi Jam'an. SE., M.Si  
NBM : 051 507

  
Mira. SE., M.Ak., Ak  
NBM : 1286 844



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

*Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411)866972 Makassar*

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi atas Nama : Alam Nursandi, Nim : 105731105518 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0013/SK-Y/62201/091004/2022, Pada Tanggal, 15 Muharam 1443 H/ 13 Agustus 2022 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Akuntansi** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 15 Muharam 1443 H  
13 Agustus 2022 M

**PANITIA UJIAN**

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H Ambo Asse, M.Ag. (.....)  
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. H Andi Jam'an, SE., M.Si (.....)  
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, SE., M.ACC (.....)  
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Muh. Amir, SE., M.Si., Ak., CA (.....)  
2. Mira, SE., M.Ak., Ak (.....)  
3. Amran, SE., M.Ak., Ak., CA (.....)  
4. Nasrullah, SE., MM (.....)

Disahkan Oleh,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar

**Dr. H Andi Jam'an, SE., M.Si**  
**NBM: 651 507**



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411)866972 Makassar

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Alam Nursandi

No. Stambuk/NIM : 105731105518

Program Studi : Akuntansi

Judul Skripsi : Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik Pada Badan  
Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bantaeng.

Dengan ini menyatakan bahwa:

**Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan Hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.**

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 13 Agustus 2022

Yang Membuat Pernyataan,



**ALAM NURSANDI**  
NIM: 105731105518

Diketahui oleh:



Dekan

**Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si**  
NBM: 651507

Ketua Program Studi

**Mira, SE., M.Ak., Ak**  
NBM: 1286 844

**HALAMAN PERNYATAAN  
PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR**

---

Sebagai sivitas akademik universitas muhammadiyah makassar, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alam Nursandi  
Nim : 105731105518  
Program Studi: Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar **hak bebas royalti noneksklusif (nonexclusive royalty free right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik Pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bantaeng.**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan hak bebas royalti noneksklusif ini universitas muhammadiyah Makassar berhak menyimpan mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Makassar, 13 Agustus 2020

Yang membuat pernyataan,



**ALAM NURSANDI**  
**NIM: 105731105518**

## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT karena atas segala nikmat dan hidayah yang tiada hentinya diberikan kepada hamba-nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pegikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik Pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bantaeng”

Skripsi yang penulis buat, bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak **A. Abd Rahim** dan ibu **Almh. Nurjannah** yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tanpa pamrih, saudara saudariku yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat sampai akhir studi, serta seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan untuk keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Sahabat-sahabatku selama kuliah, Public Enemy (Juhardi, Fifi, Asmah, Tary, Dea, Nurul, Reva) atas waktu yang diluangkan tidak kenal hujan dan panas selalu menemani serta kebaikan mereka selama ini, semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis bisa menjadi ibadah dan menjadi cahaya penerang dikehidupan dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak saya sampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak **Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si.** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu **Mira, SE., M.Ak.** selaku Plt. Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak **Nasrullah, SE., MM.** selaku Pembimbing I Yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi selesai dengan baik.
5. Ibu **Wahyuni, SE., M.Ak.** selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makasar yang tak kenal lelah dalam menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Angkatan 2018 kelas AK18.B dan ASP.1 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuan dan dorongannya dalam aktivitas studi penulis.

9. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa penulis tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, motivasi dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karna itu, kepada semua pihak terutama para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

*Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamualaikum Wr.Wb*

Makassar, Agustus 2022

**Alam Nursandi**

## ABSTRAK

**ALAM NURSANDI. 2022. Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik Pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bantaeng. Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh : Pembimbing I, Bapak Nasrullah dan Pembimbing II Ibu Wahyuni.**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hasil kinerja dan pengelolaan keuangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bantaeng dalam periode 2017-2021. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi langsung, dan dokumentasi, sehingga diperoleh data laporan keuangan tahun 2017-2021. Dengan teknik analisis data menggunakan rasio keuangan.

Hasil penelitian analisis laporan keuangan berdasarkan metode analisis keserasian menunjukkan pada tahun 2017-2021 rata-rata nilai persentasenya sebesar 90%, hal tersebut dikatakan kurang baik. Analisis varians belanja secara umum dikatakan baik, karena tidak melebihi dari yang dianggarkan. Rasio efisiensi belanja dikatakan kurang efisien karena penggunaan anggaran belanja yang terlalu tinggi. Rasio lancar menunjukkan bahwa pada tahun 2017 sampai 2021 dikatakan baik. Sebab nilai persentasenya tidak kurang dari 1%.

**Kata Kunci : Laporan Keuangan, Rasio Keuangan, Kinerja Keuangan**

## ABSTRACT

**ALAM NURSANDI. 2022. *Analysis of Public Sector Financial Statement at the National Land Agency (BPN) of Bantaeng Regency. Thesis. Departement of accounting, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar, Supervised by : supervisor I, Mr. Nasrullah and supervisor II, Mrs. Wahyuni.***

The purpose of this study was to determine the results of the performance and financial management of the Distric National Land Agency (BPN) Bantaeng in the 2017-2021 period. This research is a type. Quantitative research with a descriptive approach. Data collection techniques are carried out by direct observation and documentation, so that the 2017-2021 financial report data is obtained. With data analysis techniques using financial ratios.

The results of the analysis of financial statements based on the compability analysis method show that in 2017-2021 the average percentage value is 90%, this is Said to be less good. Analysis in general, the spending variance is said to be good, because it does not exceed the budgeted. The spending efficiency ratio is said to be less efficient. Because of the excessive use of the budget. The current ratio shows that in 2017 to 2021 it is said to be good, because the percentage value is not less than 1%.

**Keywords : Financial Statements, Financial Ratios, Financial Performance.**

## DAFTAR ISI

Halaman

### SAMPUL

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN .....	v
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
A. Pengertian Analisis, Laporan Keuangan, dan Sektor Publik .....	8
B. Analisis Laporan Keuangan dan Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik .....	11

C. Metode Analisis Yang Digunakan Dalam Laporan Keuangan Sektor Publik .....	14
D. Penelitian Terdahulu.....	17
E. Kerangka Konsep.....	24
<b>BAB III. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>26</b>
A. Jenis Penelitian .....	26
B. Jenis dan Waktu Penelitian .....	26
C. Jenis dan Sumber Data .....	27
D. Metode Pengumpulan Data .....	28
E. Definisi Operasional Variabel.....	29
F. Metode Analisis Data.....	31
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>
A. Gambaran Objek Penelitian.....	32
B. Hasil Penelitian.....	43
C. Pembahasan .....	51
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>57</b>
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>59</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
2.1 Penelitian Terdahulu .....	17
3.1 Definisi Operasional Variabel.....	29
4.1 Tabel Perhitungan Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja.....	44
4.2 Tabel Perhitungan Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja .....	45
4.3 Tabel Perhitungan Analisis Varians Belanja.....	46
4.4 Tabel Kriteria Penilaian Varians .....	47
4.5 Tabel Perhitungan Rasio Efisiensi Belanja .....	48
4.6 Tabel Kriteria Efisiensi Belanja .....	49
4.7 Tabel Perhitungan Rasio Lanacar (Current Ratio) .....	50
4.8 Tabel Rekapitulasi Hasil Perhitungan Rasio Keuangan .....	55



## DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
2.1 Kerangka Konsep .....	24
4.1 Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng .....	33



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Organisasi sektor publik dibuat untuk melaksanakan program pelayanan kepada masyarakat. Organisasi sektor publik diharapkan lebih efektif dalam memperhitungkan biaya ekonomi sosial. Terlebih lagi dengan diberlakukannya otonomi daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, dan undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. (Amping et al., 2020)

Fungsi dari organisasi sektor publik adalah melakukan pelayanan kepada masyarakat, menjalankan tata kelola organisasi, serta mewujudkan visi dan misi yang menjadi sebuah tujuan organisasi. Untuk mencapai sebuah tujuan organisasi dapat dilihat dari sistem pengendalian manajemen dan sistem pengelolaan keuangannya. Laporan keuangan merupakan sebuah informasi keuangan mengenai posisi keuangan, dan sebuah bukti untuk melihat bagaimana kinerja suatu organisasi dalam mencapai suatu tujuan. (Harahap, 2020)

Laporan keuangan pemerintah disusun berdasarkan peraturan yang berlaku, Pada tahun 2010 pemerintah mengeluarkan peraturan tentang sistem akuntansi pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (PP 71 Tahun 2010). Didalam PP Nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan

perubahan sistem akuntansi, yang awalnya sistem akuntansi berbasis kas menjadi sistem akuntansi berbasis akrual. Penyusunan laporan keuangan pemerintah berbasis akrual meliputi, laporan realisasi anggaran, laporan saldo anggaran lebih, laporan operasional, neraca, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (CALK). (Priharjanto & Andriana, 2020)

Laporan keuangan pemerintah merupakan sebuah topik yang sangat menarik dan unik untuk dikaji. Dikarenakan, masih banyaknya lembaga-lembaga publik yang salah dalam mengelola keuangannya. sehingga pimpinan suatu instansi atau pemerintah sulit untuk mengambil keputusan dan sulit untuk mempertanggung jawabkan apa yang menjadi kewajibannya dalam mengelola keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat.(Ruliaty, Ismail Badollahi, 2019)

Analisis laporan keuangan sektor publik dilakukan karena adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik. Tujuannya dilakukan analisis laporan keuangan sektor publik adalah untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan pada sebelumnya dalam menyajikan laporan keuangan. Laporan keuangan sektor publik disajikan untuk dijadikan sebagai pertanggung jawaban terkait dengan pengelolaan keuangannya selama periode tertentu.(Karlina & Handayani, 2017)

Fenomena yang terjadi yaitu masalah kesenjangan fiskal, atau tentang pemerintah dan lembaga publik yang tidak mempunyai kemampuan untuk mendanai tanggung jawab program yang dibuat dan kurangnya sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan keuangan. Sehingga cenderung tidak tercapainya tata laksana yang baik, efisien dan akuntabilitas dalam menentukan sebuah keputusan. (Sari & Yousida, 2019)

Hal ini berkaitan dengan teori yang dikembangkan oleh Fiedler yaitu teori kontigensi (*contingency theory*). Teori kontigensi menjelaskan bagaimana seorang pemimpin atau atasan melakukan pengaruhnya dan pendekatannya pada suatu kelompok. Pengelolaan keuangan dan kinerja keuangan suatu organisasi dapat dikatakan baik, dapat dilihat dari seorang atasan yang mampu mengevaluasi dan mengontrol kinerja bawahannya. (Safitri et al., 2020)

Pengukuran kinerja keuangan merupakan bagian dari fungsi pengendalian manajemen atau pimpinan, karena pengukuran kinerja keuangan dapat digunakan untuk melihat bagaimana alur aktivitas suatu organisasi sektor publik dalam mencapai tujuan. Untuk mengukur kinerja keuangan pada suatu lembaga pemerintah daerah maka perlu dilakukan analisis laporan keuangan, dengan menganalisis laporan keuangan, organisasi pemerintah bisa mengetahui bagaimana kinerja keuangan mereka, apakah mengalami peningkatan atau sebaliknya dalam setiap tahunnya. (Anshori, 2019)

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya, dalam penelitian sebelumnya untuk mengukur kinerja keuangan suatu organisasi sektor publik atau pemerintah daerah yaitu dengan menggunakan teknik analisis rasio keuangan. Jenis rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian sebelumnya terbagi beberapa yaitu, pada penelitian yang dilakukan oleh (Rukayah et al., 2017) menggunakan analisis rasio efektivitas dan rasio efisiensi untuk laporan keuangan realisasi anggaran, dalam penelitian yang dilakukan oleh (Sari & Yousida, 2019) menggunakan rasio pertumbuhan dan rasio *Dept Service Coverage Ratio* pada laporan keuangan neraca, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh (Polii et al., 2019) menggunakan rasio arus kas dari kegiatan operasi dan rasio arus kas dari aktivitas pendanaan.

Yang berbeda dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dari segi objek atau tempat penelitian dan rasio keuangan yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan. penulis mengambil tempat atau objek penelitian pada lembaga pemerintah yaitu Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Bantaeng. Indikator dalam penelitian ini adalah laporan keuangan yang berupa laporan realisasi anggaran, dan laporan keuangan neraca.

Dari fenomena yang telah diteliti berupa fenomena kesenjangan fiskal atau sistem pengelolaan keuangan yang rendah. Fenomena tersebut terjadi karena kurangnya

pengawasan dari atasan sehingga suatu organisasi tidak dapat berjalan sesuai dengan yang divisi misikan. Salah satu cara untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan dan kinerja keuangan suatu organisasi pemerintah adalah melakukan analisis laporan keuangan.

Analisis laporan keuangan adalah suatu teknik yang dilakukan untuk mengukur laporan keuangan tahun berjalan. dengan dilakukannya analisis laporan keuangan pada suatu perusahaan atau organisasi sektor publik maka diperoleh informasi bagaimana pengelolaan dan kinerja keuangan suatu organisasi sektor publik apakah dari tahun ketahun itu meningkat atau pun sebaliknya. Sekarang kita ketahui bahwa banyak lembaga-lembaga publik yang masih belum efisien dalam mengelola keuangannya dan itu bisa berdampak dalam tercapainya tujuan dari sebuah organisasi. Berdasarkan fenomena kesenjangan fiskal dan sistem pengelolaan keuangan yang rendah, oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang.

**“Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik Pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bantaeng”.**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang ada diatas maka rumusan masalah yang dapat diangkat adalah “Bagaimanakah hasil analisis laporan keuangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) periode 2017-2021, telah menunjukkan kinerja yang efektif dan sesuai dengan laporan keuangan ?”

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah “untuk mengetahui analisis laporan keuangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) periode 2017-2021, telah menunjukkan kinerja yang efektif dan sesuai dengan laporan keuangan”.

## D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk mengembangkan ilmu akuntansi, khususnya dalam bidang akuntansi pemerintahan atau akuntansi sektor publik.
- b. Dalam penelitian ini, diharapkan memberikan kontribusi tentang ilmu akuntansi, khususnya dalam bidang akuntansi sektor publik dalam analisis laporan keuangan sektor publik.
- c. Dalam penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan bagi pengembangan-pengembangan ilmu serta referensi dalam penelitian dimasa yang akan datang.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Peneliti berharap dapat menerapkan ilmu yang telah didapatkan, mengembangkan serta memperluas wawasan tentang ilmu akuntansi, khususnya dalam akuntansi pemerintahan atau sektor publik.

### b. Bagi Organisasi

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan bisa menjadi masukan yang positif dan membangun serta diterapkan dalam sistem pengelolaan keuangan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Laporan Keuangan, Analisis dan Sektor Publik

##### Teori Kontigensi (*Contingency Theory*)

Teori kontigensi merupakan suatu proses dimana kemampuan seorang pemimpin melakukan pengaruhnya tergantung pada situasi tugas kelompok dan tingkat-tingkat kepemimpinannya, kepribadiannya, dan pendekatannya yang sesuai dengan kelompoknya.

Teori Kontigensi menjelaskan tentang sistem pengendalian internal yang mencakup bagaimana seorang manajer atau pimpinan dapat memimpin sebuah organisasi dengan baik. Dalam penelitian ini teori kontigensi sangat berkaitan sebab, untuk menilai sebuah kinerja keuangan suatu organisasi publik dapat dilihat dari kemampuan seorang manejer atau pimpinan dalam mengontrol dan mengevaluasi kinerja bawahannya. Tercapainya suatu tujuan organisasi sektor publik dapat dilihat dari kemampuan seorang pemimpin atau manejer dalam melakukan tugasnya (Safitri et al., 2020).

##### 1. Pengertian Laporan keuangan

Laporan keuangan merupakan sebuah laporan yang berisi pencatatan keuangan, yang terjadi dalam sebuah bisnis, baik itu transaksi pembelian, penjualan dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan moneter dan dalam periode tertentu. Laporan keuangan dibuat untuk mengetahui kondisi

finansial suatu perusahaan atau lembaga publik secara keseluruhan. Sehingga para pengguna informasi akuntansi biasa melakukan evaluasi dan pencegahan dengan cepat dan tepat jika sedang mengalami masalah atau memerlukan perubahan.

laporan keuangan (*Financial Statement*) adalah suatu laporan yang disajikan untuk memenuhi kebutuhan para pemakai laporan keuangan, baik internal maupun eksternal, atas informasi keuangan suatu instansi atau perusahaan (Polii et al., 2019).

Laporan keuangan, terbagi dalam laporan keuangan sektor publik dan sektor swasta (Non Pemerintah). Terdapat perbedaan antara karakteristik laporan keuangan instansi pemerintah atau sektor publik dan non pemerintah atau swasta. Perbedaan tersebut meliputi perbedaan jenis-jenis laporan keuangan, elemen-elemen laporan keuangan, tujuan laporan keuangan, dan teknik akuntansi yang digunakan. Akan tetapi keduanya juga memiliki persamaan yaitu sama-sama membutuhkan standar akuntansi keuangan sebagai pedoman untuk membuat laporan keuangan. Laporan keuangan sektor swasta merupakan sebuah laporan keuangan yang disajikan untuk melihat bagaimana suatu perusahaan memperoleh laba ataupun sebaliknya, laporan keuangan sektor swasta juga harus dipertanggung jawabkan kepada pemegang saham dan kreditur. Tujuan dibuatnya sebuah laporan keuangan adalah

untuk menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan, suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan.

## 2. Pengertian Analisis

Analisis adalah mengamati efektivitas objek dengan cara mendeskripsikan komposisi objek dan menyusun kembali komponen-komponen untuk dikaji atau dipelajari secara detail. Kata analisis juga berasal dari bahasa Yunani kuno dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris "*analysis*" yang berarti memecahkan atau menguraikan. Pengertian analisis dari berbagai bidang ilmu. Pertama dalam (bidang matematika, dan logika). Analisis merupakan proses pemecahan suatu masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil sehingga bisa lebih mudah dipahami. Kedua dalam (bidang kimia). Analisis adalah penguraian suatu zat menjadi zat-zat yang lebih sederhana yang menjadi unsur-unsur pembentuknya. Ketiga dalam (bidang manajemen). Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa baik itu, berupa karangan, perbuatan dan sebagainya, guna untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Sedangkan menurut Gorys Keraf, analisis adalah sebuah proses untuk

memecahkan sesuatu ke dalam bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lain.

### 3. Sektor Publik

Sektor publik adalah sektor ekonomi yang menyediakan berbagai layanan pemerintah kepada masyarakat. Dalam ilmu ekonomi, sektor publik menghasilkan produk jasa berupa pelayanan publik dan produk barang berupa barang publik. Keberadaan sektor publik merupakan bagian dari pemenuhan hak publik. Teori dan metode akuntansi digunakan dalam proses penyelenggaraan sektor publik. Sektor publik umumnya mencakup lembaga pemerintah dan badan usaha milik negara (BUMN).

#### **B. Analisis Laporan Keuangan dan Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik**

##### 1. Pengertian Analisis Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan adalah suatu proses menelaah masing-masing unsur laporan keuangan, menelaah hubungan diantara unsur-unsur laporan keuangan tersebut agar memperoleh pengertian, pemahaman yang baik dan tepat atas laporan keuangan tersebut. Menganalisis laporan keuangan berarti menilai kinerja perusahaan atau pada organisasi sektor publik. Hal ini berguna bagi perkembangan suatu lembaga pemerintah atau perusahaan untuk mengetahui seberapa efektifkah suatu perusahaan atau lembaga publik dalam bekerja. (Prakosa, 2018). Analisis rasio keuangan dapat

gunakan sebagai gambaran terkait dengan perkembangan kinerja suatu perusahaan atau instansi dari tahun ketahun.(Farida & Nugraha, 2019)

## 2. Pengertian Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik

Analisis laporan keuangan sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik. Salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan.

Menurut peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang akuntansi pemerintahan. Bentuk-bentuk laporan keuangan, khususnya laporan keuangan sektor publik di Indonesia adalah sebagai berikut, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan (CALK). (Sari & Yousida, 2019). Laporan keuangan sektor publik adalah sebuah laporan keuangan yang disajikan untuk dijadikan sebagai pertanggung jawaban suatu lembaga pemerintah terkait dengan pengelolaan keuangannya selama periode tertentu.

## 3. Tujuan Analisis Laporan keuangan Sektor Publik.

(Karlina & Handayani, 2017) Tujuan dilakukannya analisis laporan keuangan sektor publik adalah untuk memperbaiki

kinerja keuangan suatu pemerintah daerah atau suatu instansi dalam pembuatan keputusan serta mewujudkan pertanggung jawaban atas pendapatan yang diperoleh.

Adapun tujuan analisis laporan keuangan diantaranya sebagai berikut :

- a. Menilai kinerja manajemen publik/pimpinan pada tahun berjalan.

Untuk menilai suatu manajer atau pimpinan dalam memimpin sebuah organisasi atau instansi kita bisa lihat dalam pelaporan keuangan suatu perusahaan atau instansi, sebab didalam pelaporan keuangan suatu organisasi baik itu perusahaan maupun instansi seorang manajer atau pimpinan, yang paling berperan penting dalam mengarahkan karyawan atau tenaga kerjanya khususnya dibagian keuangan.

- b. Mengetahui perubahan posisi keuangan instansi atau perusahaan pada periode tertentu.

Salah satu tujuan dilakukannya analisis laporan keuangan yaitu bagaimana mengetahui perubahan posisi keuangan, pada tahun berjalan, setelah analisis laporan keuangan dilakukan oleh suatu instansi atau perusahaan, maka dapat memperoleh informasi tentang apakah terjadi kenaikan atau penurunan dalam pengelolaan keuangan tahun berjalan pada suatu instansi atau perusahaan.

- c. Memahami kelemahan dan kelebihan apa saja yang dimiliki oleh suatu instansi atau perusahaan.

Setelah melakukan analisis laporan keuangan, manajemen publik atau pimpinan suatu instansi bisa melihat kelemahan dan kelebihan apa yang telah dilakukan selama bekerja selama satu periode sehingga pimpinan bisa memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditemukan setelah analisis misalnya, kelemahan dalam pengendalian internal, dalam pengelolaan keuangan dan sebagainya.

- d. Mengetahui langkah apa saja yang perlu dilakukan kedepannya yang berkaitan dengan posisi keuangan dan kinerja suatu lembaga pemerintah maupun perusahaan.

Jadi setelah melakukan analisis laporan keuangan, pemimpin suatu instansi ataupun perusahaan sudah bisa menyimpulkan langkah apa saja yang harus dilakukan kedepannya agar bisa mencapai tujuan dari instansi atau perusahaan tersebut.

### **C. Metode Analisis Yang Digunakan Dalam Laporan Keuangan Sektor Publik**

Metode analisis rasio keuangan yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan lembaga pemerintah terhadap pendapatan anggaran APBN dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut. (Farizky, 2018)

## 1. Analisis Anggaran

### a. Analisis keserasian

Analisis keserasian menggambarkan bahwa bagaimana suatu organisasi pemerintah atau pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal. (Fajriansyah et al., 2019)

#### 1. Rasio belanja operasi terhadap total belanja

Analisis rasio belanja operasi merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja. (Sari & Yousida, 2019) analisis rasio belanja operasi terhadap total belanja dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

#### 2. Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja

Analisis rasio belanja modal terhadap total belanja merupakan sebuah perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah. (Ratnasari & Munawaroh, 2019)

Analisis rasio belanja modal dapat dirumuskan, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Rumus.

$$\frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Modal}} \times 100\%$$

b. Analisis Varians Belanja

Analisis varians adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui perbedaan atau selisih antara realisasi belanja anggaran. pemerintah daerah dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja modal secara optimal. (Ratnasari & Munawaroh, 2019) Analisis varians dapat dirumuskan sebagai berikut.

Rumus.

$$\text{Varians Belanja} = \text{Realisasi Belanja} - \text{Anggaran}$$

c. Analisis Rasio Efisiensi Belanja

Kinerja keuangan suatu pemerintah atau lembaga pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan baik atau efisien apabila rasio yang dicapai dibawah dari 100% . semakin kecil rasio efisiensi belanja keuangan daerah maka semakin baik kinerja keuangan suatu pemerintah daerah. (Karlina & Handayani, 2017)

Untuk mengukur efisiensi belanja, dapat digunakan rumus sebagai berikut :

Rumus.

$$\text{Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Total Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

## 2. Analisis Laporan Keuangan

### a. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio lancar adalah rasio likuiditas yang mengukur kemampuan suatu perusahaan ataupun instansi untuk membayar kewajiban jangka pendeknya yang jatuh tempo dalam satu tahun, dan dihitung dengan membandingkan semua aset lancar dengan kewajiban lancar. (Prakosa, 2018)

Rasio lancar dapat dirumuskan sebagai berikut :

Rumus.

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Utang Lancar}}$$

### D. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu "Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik". Penelitian yang dilakukan oleh penulis tersebut tidak lepas dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, diantaranya sebagai berikut :

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1.	Siti Aliyah Ulfah, Sunandar, Krisdiyawati, 2018	Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pada	Analisis laporan realisasi Anggaran, kinerja keuangan, metode yang digunakan	Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat analisis rasio keuangan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Kantor pertanahan brebes dalam melakukan kinerja belanja, dilihat dari analisis varians secara umum sudah

		Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes	dalam penelitian ini adalah (Deskriptif Kuantitatif)		dikatakan baik. Namun tingkat dan kriteria efisiensi anggaran belanja secara keseluruhan kurang efisien dikarenakan penggunaan anggaran belanja terlalu tinggi.
2.	Sri Suranta, Bandi, Halim dedi perdana, dan M.syafiqqur hman, 2017	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah : Studi Komparasi Provinsi Jawa Tengah Dan Kalimantan Selatan	Kinerja keuangan pemerintah daerah jawa tengah dan kalimantan selatan, kualitas auditor, leverage, growth, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah (Kuantitatif )	Alat yang digunakan adalah, analisis statistik, uji asumsi klasik, yang meliputi uji normalitas , uji multikoline aritas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji hipotesis menggunakan analisis regresi berganda	Hasil dari penelitian menyatakan bahwa, perbedaan kinerja keuangan dalam hal kemandirian keuangan daerah, desentralisasi fiskal dan efisiensi di provinsi jawa tengah dan Kalimantan selatan, sementara itu rasio efektivitas menunjukkan tidak ada perbedaan antara kedua wilayah.
3.	Marina F. Pandjaitan, Parengkuan Tommy, Victoria N. Untu, 2018	Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Manado Tahun 2011-2016	Kinerja keuangan Dan Rasio keuangan daerah, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah (Deskriptif )	Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik analisis rasio keuangan, berupa analisis	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata derajat desentralisasi masih sangat rendah, rasio ketergantungan keuangan daerah masih tinggi, rasio kemandirian keuangan daerah rendah dengan pola konsultatif, rasio belanja operasi terhadap total

				rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio keserasian yaitu rasio belanja operasi dan rasio belanja modal, dan rasio efisiensi belanja keuangan daerah.	belanja mendominasi alokasi belanja dibandingkan rasio belanja modal terhadap total belanja dan rasio efisiensi belanja kurang efisien.
4.	Septyo Dwi Prakosa, 2018	Analisis Laporan Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan Publik Industri Sub Sektor Semen di PT.BEI	Analisis laporan keuangan dan kinerja keuangan perusahaan publik industri, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah (Deskriptif Kuantitatif)	Alat yang digunakan yaitu dengan pengukuran indikator berupa rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio leverage, dan rasio profitabilitas.	Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh hasil rata-rata volume perdagangan saham sebanyak 4547,5 (jutaan) mampu terjual pada rata-rata harga penutupan sebesar Rp. 1212,5 dan pada periode 2014-2015 perusahaan juga memiliki nilai rata-rata PER (price earning ratio) sebesar 64,825x yaitu satu nilai yang besar artinya harga atas keuntungan perlembar saham. Perusahaan juga mengambil

					kebijakan untuk membagikan deviden sebesar 15,86% yang artinya hasil laporan rangkuman kinerja mampu menarik minat calon investor untuk membeli saham yang go public di PT. BEI walaupun secara perhitungan rasio keuangan kinerja PT. Wijaya karya beton Tbk masuk dalam kategori baik.
5.	Akhmad Priharjanto dan Nina Andrianan, 2020	Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan , Kapasitas Sumber Daya Manusia, Dan Aksesibilitas Terhadap Pemanfaatan Laporan Keuangan .	Kualitas Laporan Keuangan , Kapasitas Sumber Daya Manusia, Aksesibilitas, dan Pemanfaatan Laporan Keuangan , metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah (Kuantitatif )	Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji validitas dan realibilitas, uji asumsi klasik, uji koefisien determinasi dan hipotesis.	Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa, kualitas laporan keuangan secara signifikan mempengaruhi pemanfaatan laporan keuangan oleh manajemen, selanjutnya kapasitas sumber daya secara signifikan berpengaruh terhadap pemanfaatan laporan keuangan, sedangkan aksesibilitas itu sendiri tidak berpengaruh terhadap laporan keuangan, dan terakhir kapasitas sumberdaya manusia dan aksesibilitas secara simultan mempengaruhi pemanfaatan laporan keuangan.

6.	Ai Siti Farida, Raden Faisal Maulanan Nugraha, 2019	Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang	Kinerja keuangan daerah, rasio kemandirian, rasio keselarasan, rasio pertumbuhan, rasio efisiensi PAD, rasio efektifitas PAD, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah (Deskriptif Kualitatif)	Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis laporan keuangan berupa, analisis rasio pertumbuhan keuangan daerah, analisis rasio efisiensi PAD, analisis rasio efektivitas PAD, Analisis rasio keserasian, dan analisis rasio kemandirian	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah kabupaten subang di tinjau dari (1) rasio kemandirian menunjukkan bahwa kabupaten subang sangat mandiri dengan rata-rata 17,1%, (2) rasio keserasian, pemerintah kabupaten subang cenderung lebih memprioritaskan belanja operasional dari pada belanja modal. Biaya operasional sebesar 73,75% dan untuk belanja modal rata-rata 21,75%, (3) rasio pertumbuhan keuangan daerah dapat dikatakan masih sangat rendah dengan rata-rata sebesar 8,6% (4) rasio efisiensi pendapatan dapat dikatakan tidak efisien, karena rata-rata tingkat efisiennya adalah 63,3% (5) rasio efektivitas pendapatan asli daerah kabupaten subang sudah efektif karena rata-rata efektivitasnya di atas 100% yaitu 113,8%
7.	Yudi Fajriansyah, Inggriani Elim, Stanley Kho Walandouw,	Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota	Anggaran, alat ukur kinerja terhadap kinerja keuangan,	Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode	Hasil dari penelitian ini adalah secara umum kinerja keuangan pendapatan daerah pemerintah kota

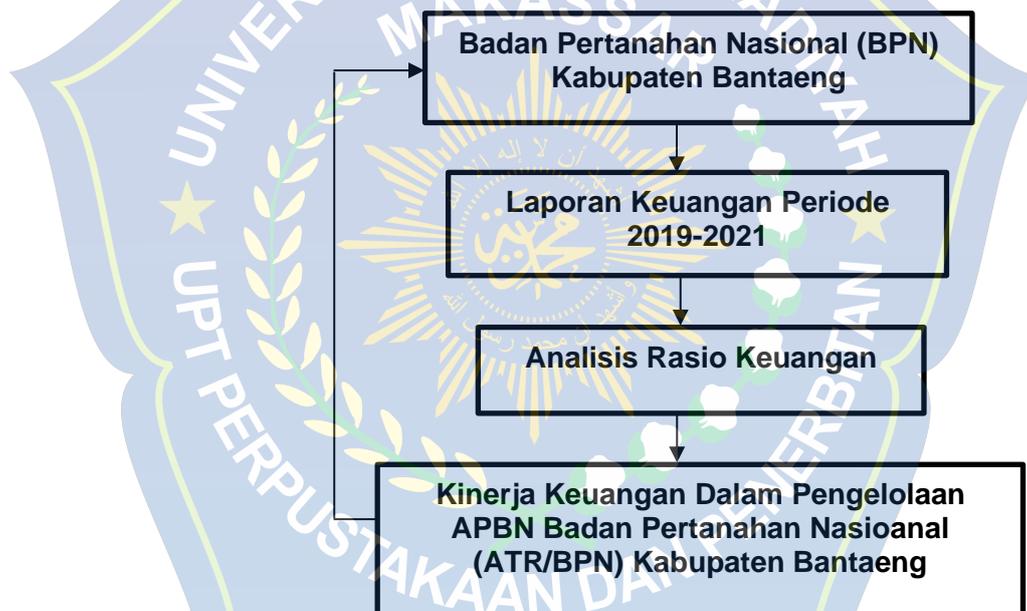
	2019	Bitung Tahun Anggaran 2016-2017	metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah (Deskriptif Kualitatif)	analisis laporan keuangan berupa analisis kemandirian keuangan daerah, analisis rasio ketergantungan keuangan daerah, analisis rasio derajat desentralisasi, dan analisis rasio belanja daerah	bitung dilihat dari analisis varian dan pertumbuhan dapat di kategorikan baik, sedangkan untuk analisis rasio keuangan dinilai tidak baik. kinerja keuangan belanja daerah pemerintah kota bitung dilihat dari analisis varian dan pertumbuhan dapat di kategorikan baik, sedangkan untuk analisis rasio keserasian belanja operasional dapat di kategorikan serasi sehingga rasio keserasian belanja modal kurang serasi.
8.	Heri Faisal Harahap, 2020	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah	Analisis kinerja keuangan, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah (Deskriptif Kuantitatif)	Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah dan rasio efektivitas.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah tapanuli tengah secara umum dikatakan cukup baik, walaupun dengan rasio derajat desentralisasi masih relative rendah, ketergantungan keuangan kepada pemerintah pusat masih sangat tinggi dan penerimaan pendapatan asli daerah tidak mencapai target anggaran.
9.	Ruliyati, Ismail Badollahi, A Indah nurfadillah,	Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk	Analisis realisasi anggaran terhadap kinerja	Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu	Hasil dari penelitian ini adalah, kemandirian pemerintah daerah kabupaten bone

	2019	Mengukur Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone	keuangan, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah (Deskriptif Kuantitatif)	dengan menghitung secara manual dengan rasio keuangan yang digunakan .	dalam memenuhi kebutuhan dana mengalami naik turun dari tahun ketahun yaitu dari 4,19% pada tahun 2014, menjadi 4,33% pada tahun 2015 dan 3,01% pada tahun 2016
10.	Anis Karlina, Nur Handayani, 2017	Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan APBD kota surabaya tahun 2012-2015	Pengelolaan APBD, terhadap kinerja keuangan, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah (Kualitatif)	Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menghitung menggunakan metode analisis, analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran belanja daerah	Hasil dari penelitian ini adalah dilihat dari varian pendapatan pada tahun 2012-2015 dapat disimpulkan secara umum kurang baik, untuk rasio keuangan pendaptan daerah selama tahun 2012-2015 menunjukkan bahwa derajat desentralisasi dapat dikatakan sangat baik. Untuk rasio kemandirian dalam penelitian ini untuk pemerintah kota surabaya masuk dalam ketergantungan kepada pemerintah pusat sangat rendah. Untuk pertumbuhan pendaptan PAD dari tahun 2012-2015 pertumbuhannya positif. Dan dilihat dari efesiensi belanja daerah, realisasi anggaran belanja pemerintah daerah kota surabaya tidak terdapat angka melebihi anggaran belanja.

### E. Kerangka Konsep

Objek dalam penelitian ini adalah badan pertanahan nasional (BPN) kabupaten bantaeng, atau sering disebut dengan kantor pertanahan. Kantor pertanahan merupakan suatu lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang agraria atau pertanahan sesuai dengan peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015.

.Adapun alur dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.1. Kerangka Konsep

Sesuai dengan teori kontingensi bahwa untuk pengelolaan keuangan dan kinerja keuangan yang efisien didukung dengan seorang atasan atau pimpinan yang mampu mengatur dan mengevaluasi kinerja bawahannya. Dari kerangka konseptual ini menjelaskan bahwa analisis laporan keuangan suatu organisasi dapat melihat kondisi keuangannya. Pengukuran kinerja sangat

penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan pemimpin suatu organisasi. Dengan menggunakan teknik analisis rasio keuangan dan data berupa laporan keuangan periode 2017-2021. (Karlina & Handayani, 2017)

Analisis laporan keuangan dilakukan untuk mengetahui kualitas suatu laporan keuangan. Dan juga untuk mengukur kinerja suatu instansi dalam mengelola keuangannya dalam masa periode tertentu. Kinerja keuangan suatu organisasi merupakan sebuah hasil dari kegiatan yang telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. (Aldy H.R pangkei, ivonne S. saerang, 2017)



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Dalam melakukan sebuah penelitian, yang terpenting adalah menentukan metode dan pendekatan penelitian yang akan digunakan. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiyono (2013: 7) mengenai metode penelitian deskriptif yaitu : “penelitian adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antar satu variabel dengan variabel lain.” Sedangkan menurut Arikunto (2019), penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki suatu kondisi, keadaan, atau peristiwa lain, kemudian hasilnya akan di paparkan dalam bentuk laporan penelitian.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **a. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini lokasi yang diambil untuk penelitian adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten bantaeng.

##### **b. Waktu penelitian**

Penelitian dilakukan pada bulan mei 2022 adapun target waktu untuk melakukan penelitian ini adalah pada bulan mei sampai bulan juni 2022.

### C. Jenis dan Sumber Data

#### 1. Jenis data

Didalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif merupakan penelitian untuk mengumpulkan informasi mengenai perilaku penelitian dan subjek penelitian pada suatu periode tertentu. Penelitian deskriptif kuantitatif berusaha menemukan sesuatu sebagai alternatif dalam mengatasi sebuah masalah penelitian melalui prosedur ilmiah yang bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Data yang diambil dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti berupa laporan keuangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada 5 tahun terakhir ini, mulai dari tahun 2017 sampai 2021.

#### 2. Sumber data

Sumber data pada penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

##### a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti berupa laporan keuangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bantaeng dalam 5 tahun terakhir 2017-2021. Sumber data diperoleh langsung dari sumber asli tanpa ada media perantara. Data yang diambil langsung atau diperoleh dari pihak-pihak yang memahami dan menguasai dari objek kajian.

b. sumber data sekunder

Dalam penelitian ini data yang diambil atau diperoleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada, berupa data arsip tentang objek penelitian.

**D. Metode Pengumpulan Data**

a. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada 5 tahun terakhir mulai dari tahun 2017 sampai 2021.

b. Metode Observasi

Observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data dengan mengadakan peninjauan langsung pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bantaeng. Guna mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Peneliti mengamati semua yang berhubungan dengan keuangan, berupa laporan keuangan, yang terdiri dari laporan neraca, arus kas, dan laporan realisasi anggaran pada 5 tahun terakhir 2017-2021.

c. Metode Wawancara

Menurut Sugiyono metode wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan bisa dilakukan dengan cara tatap muka atau secara langsung maupun

dengan menggunakan jaringan telepon. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan pada staf keuangan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bantaeng.

## E. Definisi Operasional Variabel

### a. Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

1. Laporan keuangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bantaeng tahun 2017-2021.
2. Analisis rasio keuangan.
3. Kinerja keuangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bantaeng.

### b. Definisi Operasional

Tabel 3.1

Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Operasional
1.	Laporan keuangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bantaeng Tahun 2017-2021	Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bantaeng periode 2017-2021, Laporan keuangan yang akan digunakan meliputi laporan realisasi anggaran, laporan keuangan neraca, dan laporan arus kas
2.	Analisis rasio keuangan	Analisis rasio keuangan sebuah alat yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan, suatu instansi atau pemerintah daerah.

3.	Kinerja Keuangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bantaeng	Kinerja keuangan merupakan sebuah hasil dari kinerja suatu instansi dalam mengelola keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat.
----	---	--

Adapun rumus yang digunakan untuk mengukur adalah sebagai berikut.

a. Analisis Anggaran

1. Analisis keserasian

a. Rasio belanja operasi terhadap total belanja

Rumus.

$$\frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

b. Rasio belanja modal terhadap total belanja

Rumus.

$$\frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Modal}} \times 100\%$$

2. Analisis varians belanja

Rumus.

$$\text{Varians Belanja} = \text{Realisasi Belanja} - \text{Anggaran}$$

3. Analisis rasio efisiensi belanja

Rumus.

$$\text{Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Total Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

b. Analisis laporan keuangan

1. Rasio lancar (*Current ratio*)

Rumus.

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Utang Lancar}}$$

#### F. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif, metode ini menerapkan konsep perhitungan rasio keuangan, yaitu dengan menghitung rasio keuangan dari pos-pos dalam laporan keuangan untuk tahun anggaran 2017-2021. Metode ini dilakukan dengan memperhatikan indikator kinerja badan pertanahan nasional dalam mengelola keuangannya dengan menggunakan rasio sebagai berikut Analisis keserasian, yang berupa rasio belanja operasi terhadap total belanja dan rasio belanja modal terhadap total belanja, Analisis varians belanja, Rasio efisiensi belanja, dan Rasio lancar (*Current Ratio*).

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Objek Penelitian

Obejk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Bantaeng. Penelitian ini melihat bagaimana pengelolaan dan kinerja keuangan pada periode lima tahun terakhir yaitu 2017-2021.

##### 1. Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten Bantaeng

Bantaeng merupakan sebuah kabupaten yang berada di provinsi Sulawesi selatan Indonesia dengan luas wilayah 395,83 km. kantor pertanahan (ATR/BPN) merupakan lembaga publik yang mempunyai tugas, sesuai dengan peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 17 tahun 2015, yaitu menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang agrarian atau pertanahan.

##### 1. Visi Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten bantaeng

Kantor pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten bantaneg memiliki visi yaitu sebagai berikut :

“terwujudnya penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang terpercaya dan berstandar dunia dalam melayani masyarakat unruk mendukung tercapainya: Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

##### 2. Misi Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten Bantaeng

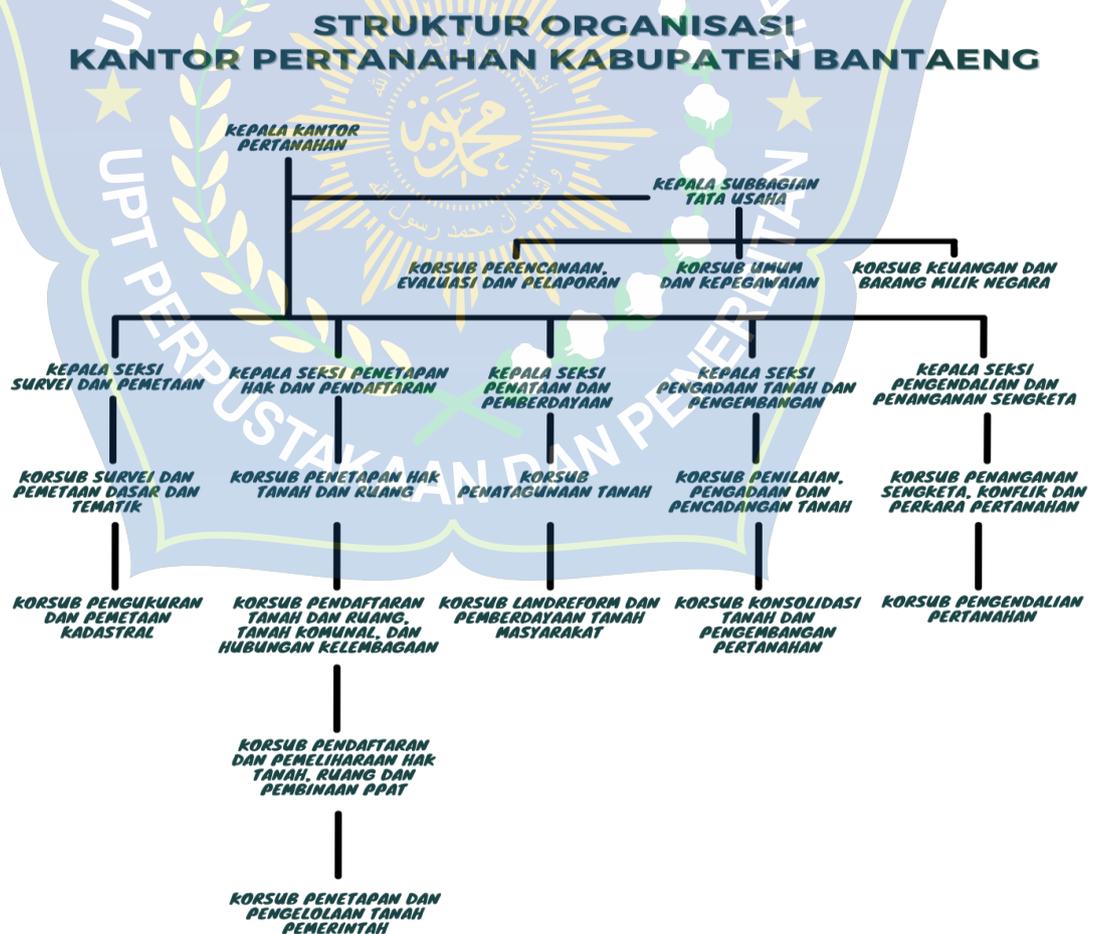
Untuk mewujudkan visi tersebut maka ada 2 misi yang akan dilaksanakan yaitu :

- a. Menyelenggarakan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang produktif, berkelanjutan, dan berkeadilan;
- b. Menyelenggarakan pelayanan dan penataan ruang yang berstandar dunia;

## 2. Struktur Organisasi Dan Peran Jabatan

### a. Gambar Struktur Organisasi

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kantor pertanahan Kabupaten bantaeng



## b. Peran Jabatan

### 1. Kepala Kantor Pertanahan

kepala kantor pertanahan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan strategis pertanahan, dan kegiatan pertanahan serta pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasandi kantor wilayah dan pertanahan.

### 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Kepala sub bagian tata usaha memiliki tugas melakukan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi kantor pertanahan. seperti pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan pelayanan informasi, advokasi hukum, peraturan perundang-undangan, dan penanganan pengaduan masyarakat.

### 3. Korsub Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan

Koordinator sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pelaporan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan strategis pertanahan.

#### 4. Korsub Umum Dan Kepegawaian

Koordinator sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan urusan organisasi, ketata laksanaan, analisis jabatan, dan pengelolaan urusan kepegawaian, pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi di kantor pertanahan, pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, protocol, perlengkapan, dan penyelenggaraan, layanan pengadaan, pengoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pelayanan pertanahan, pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan pelayanan informasi, advokasi hukum, peraturan perundang-undangan, dan penanganan pengaduan masyarakat

#### 5. Korsub Keuangan Dan Barang Milik Negara

Koordinator sub bagian keuangan dan barang milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan urusan keuangan dan administrasi barang milik Negara.

#### 6. Kepala Seksi Survei Dan Pemetaan

Kepala seksi survei dan pemetaan mempunyai tugas melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang dan ruang, pemeliharaan kerangka dasar kadastral nasional dan pengukuran batas administrasi dan kawasan, pengukuran dan pemetaan dasar, survei dan pemetaan tematik bidang dan kawasan pertanahan dan

ruang serta pembinaan tenaga teknis dan surveyor berlisensi.

#### 7. Kepala Seksi Penetapan Hak Dan Pendaftaran

Kepala seksi penetapan hak dan pendaftaran mempunyai tugas, melaksanakan pembinaan, koordinasi, pelaksanaan dan inventarisasi, identifikasi, pengelolaan data dan penyajian informasi penetapan hak tanah dan ruang, pendaftaran tanah dan ruang, pemeliharaan hak atas tanah dan ruang, penatausahaan tanah ulayat dan hak komunal, penetapan dan pengelolaan tanah pemerintah, hubungan kelembagaan serta pembinaan dan pengawasan mitra kerja dan pejabat pembuat akta tanah (PPAT).

#### 8. Kepala Seksi Penataan Dan Pemberdayaan

Kepala seksi penataan dan pemberdayaan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian pembinaan dan pelaksanaan landreform, pengelolaan dan analisis penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, redistribusi tanah, pemberdayaan tanah masyarakat, penatagunaan tanah, penataan tanah sesuai rencana tata ruang, fasilitasi penyusunan rencana tata ruang dan pemanfaatan ruang di daerah , dab penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan wilayah tertentu.

#### 9. Kepala Seksi Pengadaan Tanah Dan Pengembangan

Kepala seksi pengadaan tanah dan pengembangan mempunyai tugas melaksanakan pengordinasian, pelaksanaan pengadaan dan pencadangan tanah, konsolidasi tanah, pengembangan pertanahandan pemanfaatan tanah serta penilaian tanah dan ekonomi pertanahan.

#### 10. Kepala Seksi Pengendalian Dan Penanganan Sengketa

Kepala seksi pengendalian dan penanganan sengketa mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pelaksanaan pengendalian hak tanah, alih fungsi lahan, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, penertiban penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, penanganan sengketa dan konflik, serta penanganan perkara pertanahan.

#### 11. Korusub Survei, Dan Pemetaan Dasar Dan Tematik

Koordinator sub bagian survei dan pemetaan dasar dan tematik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan survey, dan pemetaan tematik pertanahan, perbatasan dan wilayah tertentu, dan pelaksanaan, koordinasi dan pembinaan tenaga teknis dan petugas

survei dan pemetaan tematik pada kantor pertanahan di wilayahnya, serta evaluasi dan pelaporan.

## 12. Korsub Penetapan Hak Tanah Dan Ruang

Koordinator penetapan hak tanah dan ruang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan pemberian penetapan, perpanjangan dan penetapan kembali hak perseorangan dan badan hukum swasta serta hak atas ruang dan hak komunal, penyiapan bahan pemberian izin dan penetapan hak atas tanah badan sosial/keagamaan serta penegasan sebagai tanah wakaf, tanah bekas milik belanda dan bekas tanah asing lainnya, penyiapan bahan penunjukan badan hukum tertentu yang dapat mempunyai hak milik, pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi tanah hak perseorangan dan badan hukum swasta serta hak atas ruang pelaksanaan pemberdayaan hak atas tanah masyarakat, penyiapan kerja sama dengan lembaga pemerintah, dan lembaga non pemerintah dalam rangka pemberdayaan ha katas tanah masyarakat, pelaksanaan pengembangan dan desiminasi model pemberdayaan ha katas tanah masyarakat, serta evaluasi dan pelaporan.

### 13. Korsub Penatagunaan Tanah

Koordinator sub bagian penatagunaan tanah mempunyai tugas melakukan pemantauan pelaksanaan penyusunan persediaan tanah, penetapan penggunaan dan pemanfaatan tanah, neraca penatagunaan tanah, bimbingan dan penerbitan pertimbangan teknis pertanahan dan penatagunaan tanah, pemantauan dan evaluasi perubahan penggunaan tanah, pengelolaan basis data dan sistem informasi geografi, pelaksanaan inventarisasi pengelolaan basis data potensi dan data lahan pertanian pangan berkelanjutan, serta evaluasi dan pelaporan.

### 14. Korsub Penilaian, Pengadaan Dan Pencadangan Tanah

Koordinator sub bagian penilaian, pengadaan dan pencadangan tanah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan penilaian tanah, bidang tanah dan properti, pelaksanaan pengadaan, pemutakhiran, dan kerja sama pembuatan peta zona nilai tanah kabupaten/kota, peta zona nilai ekonomi kawasan dan potensi sumberdaya agraria, pelaksanaan dan pengelolaan informasi dan komputerisasi kegiatan pertanahan berbasis data zona nilai tanah dan zona nilai ekonomi kawasan, serta evaluasi dan pelaporan.

#### 15. Korsub Penanganan Sengketa, Konflik Dan Perkara Pertanahan

Koordinator sub bagian penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan mempunyai tugas melakukan persiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan pencegahan, penanganan, dan penyelesaian sengketa/konflik pertanahan, serta analisis dan persiapan usulan pembetulan hak atas tanah serta evaluasi dan pelaporan.

#### 16. Korsub Pengukuran Dan Pemetaan Kadastral

Koordinator sub bagian pengukuran dan pemetaan kadastral mempunyai tugas melakukan persiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan pengukuran, dan pemetaan kadastral pembukuan serta pengelolaan basis data dan informasi batas bidang tanah, ruang dan perairan, serta evaluasi dan pelaporan.

#### 17. Korsub Pendaftaran Tanah Dan Ruang, Tanah Komunal Dan Hubungan Kelembagaan

Koordinator pendaftaran tanah dan ruang, tanah komunal dan hubungan kelembagaan mempunyai tugas melakukan persiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah, hak atas ruang, hak milik atas satuan

rumah susun, hak pengelolaan, hak tanggungan, tanah wakaf, hak atas tanah badan sosial, keagamaan dan pencatatan pembatalan hak serta hapusnya hak, serta evaluasi dan pelaporan.

18. Korsub Landreform Dan Pemberdayaan Tanah Masyarakat

Koordinator sub bagian landreform dan pemberdayaan tanah masyarakat mempunyai tugas melakukan persiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan inventarisasi, dan pengelolaan basis data tanah objek landreform, pendayagunaan tanah objek landreform, serta evaluasi dan pelaporan.

19. Korsub Konsolidasi Tanah Dan Pengembangan Pertanahan

Koordinator sub bagian konsolidasi tanah dan pengembangan pertanahan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan redistribusi tanah dan pemanfaatan bersama atas tanah, pelaksanaan penyusunan potensi objek konsperencanaan, pengembangan desain, promosi, koordinasi dan kerja sama konsolidasi tanah serta bimbingan partisipasi masyarakat, pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan data, evaluasi, penanganan permasalahan dan

pelaporan potensi objek konsolidasi tanah dan konsolidasi tanah serta evaluasi dan pelaporan.

#### 20. Korsub Pengendalian Pertanahan

Koordinator sub bagian pengendalian pertanahan mempunyai tugas melakukan persiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan pengendalian, dan pemantauan pertanahan, pelaksanaan penelitian data dan persiapan usulan serta rekomendasi penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar, serta evaluasi dan pelaporan.

#### 21. Korsub Pendaftaran Dan Pemeliharaan Hak Tanah, Ruang Dan Pembinaan PPAT

Koordinator sub bagian pendaftaran dan pemeliharaan hak tanah, ruang dan pembinaan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mempunyai tugas melakukan persiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pemeliharaan data, pendaftaran tanah dan ruang, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan, tanah wakaf, dan pemberian izin peralihan hak, pelepasan hak, perubahan dan penggunaan dan perubahan pemanfaatan/komoditas, peralihan saham, pengembangan dan pembinaan PPAT, pelaksanaan dan pengelolaan informasi dan komputersasi kegiatan

pertanahan berbasis data yuridis, serta evaluasi dan pelaporan.

## 22. Korsub Penetapan Dan Pengelolaan Tanah Pemerintah

Koordinator sub bagian penetapan dan pengelolaan tanah pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pembinaan perencanaan dan persiapan pengadaan tanah, pelaksanaan pengadaan tanah pemerintah, dan penyerahan hasil pengadaan tanah, pelaksanaan penetapan hak atas tanah, izin peralihan hak atau izin pelepasan hak dan kerja sama pemanfaatan aset instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, dan badan usaha pemerintah, serta evaluasi dan pelaporan.

### **B. Hasil Penelitian**

#### 1. Analisis Data

metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan menggunakan rumus rasio keuangan, berupa analisis keserasian, analisis varians belanja, rasio efisiensi belanja, dan rasio lancar (current ratio), adalah sebagai berikut

:

##### a. Analisis keserasian

Analisis keserasian menggambarkan bagaimana suatu organisasi atau pemerintah memprioritaskan alokasi

dananya pada belanja rutin secara optimal. Menurut Mahmudi (2016) standar penilaian analisis keserasian yaitu jika persentasenya > 100 dikatakan tidak baik, 90%-100% dikatakan kurang baik, 80%-90% dikatakan cukup baik, 60%-80 dikatakan baik, dan < 60% dikatakan sangat baik. Analisis laporan keuangan kantor pertanahan tahun 2017-2021 dengan menggunakan analisis keserasian dapat dilihat dari perhitungan berikut ini :

1. Rasio belanja operasi terhadap total belanja

Tabel 4.1

Tabel perhitungan rasio belanja operasi terhadap total belanja

Tahun [1]	Belanja Opreasi (Rp) [2]	Anggaran (Rp) [3]	Rasio % [2/3 x 100]
2017	3.454.700.703	3.933.204.000	87,83
2018	5.437.633.284	6.017.465.000	90,36
2019	6.213.927.301	6.679.897.000	93,02
2020	6.092.901.932	6.589.370.000	92,47
2021	6.884.139.757	7.107.070.000	96,86

Sumber : Data penelitian diolah tahun 2022

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel diatas rasio belanja operasi terhadap total belanja menunjukkan pada tahun 2017 realisasi belanja operasi sebesar 3.454.700.703 atau sekitar 87,83% hal ini dapat dikatakan cukup baik. Pada tahun 2018 nilai perentasenya meningkat sebesar 90,36% Hal ini dikatan kurang baik.

Selanjutnya pada tahun 2019 hingga tahun 2021 nilai persentasenya terus meningkat secara signifikan hingga tahun 2021, dengan nilai persentasenya rata-rata 90% hal tersebut dikatakan kurang baik. Realisasi belanja operasi tahun 2021 sebesar 6.884.139.757 atau sekitar 96,86% hal ini dapat dikatakan kurang baik.

## 2. Rasio belanja modal terhadap total belanja

Tabel 4.2

Tabel perhitungan rasio belanja modal terhadap total belanja

Tahun [1]	Belanja Modal (Rp) [2]	Anggaran (Rp) [3]	Rasio % [2/3 x 100]
2017	163.363.600	186.125.000	87,77
2018	-	-	-
2019	-	-	-
2020	21.984.000	23.524.000	93,45
2021	87.556.200	90.668.000	96,57

Sumber : Data penelitian diolah tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas hasil perhitungan rasio belanja modal terhadap total belanja menunjukkan pada tahun 2017 realisasi belanja modal sebesar 163.363.600 atau sekitar 87,77% hal ini dapat dikatakan cukup baik. Pada tahun 2018 dan 2019 anggaran untuk belanja modal dialokasikan ke belanja operasi karna meningkatnya kegiatan operasional kantor pertanahan kabupaten bantaeng. Pada tahun 2020 belanja

modal meningkat sebesar 93,45% hal ini dikatakan kurang baik, dan pada tahun 2021 meningkat secara signifikan sebesar 96,57% hal tersebut juga dikatakan kurang baik.

b. Analisis varians belanja

Analisis varian (selisih) belanja merupakan analisis terhadap perbedaan antara realisasi belanja dengan anggaran. Analisis varians belanja dapat dilihat dari perhitungan dibawah ini:

Tabel 4.3

Tabel perhitungan analisis varians belanja

Tahun	Realisasi (Rp) [a]	Anggaran (Rp) [b]	Selisih (Rp) [a]-[b]
2017	3.618.064.303	4.119.329.000	(501.264.697)
2018	5.437.633.284	6.017.465.000	(579.831.716)
2019	6.213.927.301	6.679.897.000	(465.969.699)
2020	6.114.885.932	6.612.894.000	(498.008.068)
2021	6.941.695.957	7.197.738.000	(256.042.043)

Sumber : Data penelitian diolah tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas hasil perhitungan nilai varians belanja pada tahun 2017 selisih antara realisasi belanja dengan anggaran sebesar Rp. 501.264.697, pada tahun 2018 selisih antara realisasi belanja dan anggaran sebesar Rp. 579.831.716, pada tahun 2019 selisihnya sebesar Rp. 465.969.699, dan pada tahun 2020 selisih antara realisasi belanja dengan

anggaran sebesar Rp. 498.008.068 sedangkan pada tahun 2021 selisishnya sebesar Rp. 256.042.043.

Menurut mahmudi (2010) dalam penilaian varians dapat dikategorikan menjadi dua yaitu:

1. Varian disukai (*favourable variance*) : Realisasi < Anggaran
2. Varian tidak disukai (*unfavourable variance*) : Realisasi > anggaran.

Tabel 4.4

Tabel Kriteria penilaian Varians

Tahun	Varians	Kriteria
2017	Realisasi < Anggaran	Disukai
2017	Realisasi < Anggaran	Disukai
2018	Realisasi < Anggaran	Disukai
2020	Realisasi < Anggaran	Disukai
2021	Realisasi < Anggaran	Disukai

Sumber : Data penelitian diolah tahun 2022

Pada tahun 2017 sampai pada tahun 2021 anggaran belanja yang terealisasi tidak melebihi dari yang dianggarkan sebab kantor pertanahan melakukan penghematan anggaran oleh karena itu masuk dalam kategori varian disukai.

#### c. Rasio efesiensi belanja

Rasio efesiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi dengan anggaran belanja. Rasio efesiensi belanja tahun 2017-2021 dapat dilihat dari perhitungan dibawah ini.:

Tabel 4.5

Tabel perhitungan rasio efisiensi belanja

Tahun	Anggaran Belanja (Rp) [c]	Realisasi Belanja (Rp) [d]	Persentase(%) (Rp) [c/d x 100 %]
2017	4.119.329.000	3.618.064.303	114%
2018	6.017.465.000	5.437.633.284	111%
2019	6.679.897.000	6.213.927.301	107%
2020	6.612.894.000	6.114.885.932	108%
2021	7.197.738.000	6.941.695.957	104%

Sumber : Data penelitian diolah tahun 2022

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efisiensi belanja tingkat keefisienan belanja kantor pertanahan berfluktuasi. Pada tahun 2017 presentase realisasi anggarannya sebesar 114% hal ini dikatakan kurang efisien. Pada tahun 2018 tingkat keefisienan belanja lebih baik dari tahun sebelumnya karena nilai persentasenya menurun hingga 111% akan tetapi masih tergolong kurang efisien. Pada tahun 2019 tingkat keefisienan belanja kantor pertanahan lebih baik dari dua tahun sebelumnya karena nilai persentasenya kembali menurun hingga 107% akan tetapi masih tidak efisien dan pada tahun 2021 nilai persentase tingkat keefisienan belanja menurun secara signifikan sebesar 104% hal ini menunjukkan bahwa dari tahun ketahun kantor pertanahan mampu mengelola anggaran belanjanya dengan baik meskipun nilai persentase 104%

masih tergolong tidak efisien. Karena standar keefisienan belanja yang efisien 60%-80%.

Standar kriteria efisiensi belanja dapat dijelaskan bahwa presentase kurang dari 60% dapat dikatakan sangat efisien, 60%-80% dapat dikatakan efisien, 80%-90% dapat dikatakan cukup efisien, 90%-100% dikatakan kurang efisien, dan presentase melebihi 100% dikatakan tidak efisien. Hasil tingkat efisiensi setelah dibandingkan dengan kriteria efisiensi adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6

Tabel kriteria efisiensi anggaran belanja

Tahun	Persentase (%)	Kriteria
2017	114%	Kurang Efisien
2018	111%	Kurang Efisien
2018	107%	Kurang Efisien
2020	108%	Kurang Efisien
2021	104%	Kurang Efisien

Sumber : Data penelitian diolah tahun 2022

Pada tahun 2017 hingga pada tahun 2021 nilai persentase keefisienan belanja cukup membaik meskipun belum memenuhi standar keefisienan belanja.

#### d. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio lancar menunjukkan kemampuan organisasi dalam membayar hutang yang segera harus dibayar, dengan aktiva lancarnya. Rasio lancar merupakan ukuran standar untuk menilai kesehatan keuangan organisasi,

baik organisasi bisnis maupun sektor publik, adapun perhitungan rasio lancar adalah sebagai berikut :

Tabel 4.7

Tabel perhitungan rasio lancar (*Current Ratio*)

Tahun	Aktiva Lancar (Rp) [a]	Hutang Lancar (Rp) [b]	Rasio Lancar(%) (Rp) [a/b]
2017	114.908.418	704.020	163,21
2018	9.836.316	1.127.900	8,74
2019	21.329.308	2.536.100	8,43
2020	19.376.290	25.137.216	0,77
2021	10.271.343	12.635.800	0,80

Sumber : Data penelitian diolah tahun 2022

Berdasarkan hasil perhitungan rasio lancar (*current ratio*) pada tahun 2017 persentase dianggap baik sekali karena nilai persentasenya melebihi dari satu persen. Pada tahun 2018 dan 2019 dapat dikatakan baik sekali karena nilai persentasenya masih lebih tinggi, meskipun nilai persentasenya menurun dari tahun sebelumnya. yaitu sebesar 8,74% pada tahun 2018 dan 2019 sebesar 8,43%. Pada tahun 2020 dan 2021 nilai persentasenya menurun secara signifikan yaitu sebesar 0,77% pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 sebesar 0,80% hal ini masih dikatakan baik karna nilai persentasenya belum kurang dari 1%.

### C. Pembahasan

Kinerja keuangan dan sistem pengelolaan keuangan suatu organisasi dapat dilihat dari hasil analisis laporan keuangannya dan sistem pengendalian internal. Pengukuran kinerja keuangan merupakan fungsi dari pengendalian manajemen atau atasan, karena untuk mencapai suatu tujuan organisasi dapat dilihat dari seorang pimpinan yang mengatur, mengawasi dan mengevaluasi bawahannya . Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis laporan keuangan Badan pertanahan nasional (BPN) periode 2017 sampai 2021 dengan menggunakan teknik analisis rasio keuangan, pembahasan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Analisis Keserasian

Dari hasil perhitungan Analisis keserasian, dapat dilihat bahwa pada tahun 2017-2021 sebagian besar anggaran yang dimiliki untuk belanja organisasi, lebih banyak dialokasikan untuk belanja operasi dibandingkan belanja modal sehingga presentase belanja operasi lebih tinggi dibandingkan dengan belanja modal. Dari lima tahun tersebut dapat diketahui kantor pertanahan kabupaten bantaeng sangat memprioritaskan belanjanya untuk belanja operasi. Hal ini disebabkan belanja operasi sangat dibutuhkan oleh kantor pertanahan kabupaten bantaeng karena untuk menunjang pelayanan kantor agar lebih efisien dalam melayani masyarakat.

Selisish perbandingan belanja operasi dan belanja modal sangat tinggi oleh karna itu kantor pertanahan kabupaten

bantaeng untuk mengoptimalkan belanja modal karena belanja modal digunakan untuk aset-aset tetap yang akan berguna dalam jangka panjang.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Ulfah et al., 2018) yang menggunakan analisis keserasian dalam mengukur belanja dalam laporan realisasi anggaran..

## 2. Analisis varians belanja

Dari hasil analisis varians belanja secara umum menunjukkan kinerja kantor pertanahan kabupaten bantaeng, yang menunjukkan bahwa pada tahun anggaran 2017-2021 terdapat selisih anggaran belanja dengan realisasi yang bersaldo negatif atau bisa dikatakan sebagai varian disukai (*Favorable Variance*) yang menunjukkan bahwa adanya penghematan penggunaan realisasi anggaran. Dapat dilihat pada tahun 2017 terdapat selisih sebesar Rp.501.264.967, pada tahun 2018 selisihnya sedikit naik sebesar Rp.579.831,716 karena menyisihkan anggaran dalam kegiatan-kegiatan tertentu. Pada tahun 2019 selisihnya menurun sebesar Rp.465.969.699 karena anggaran direalisasikan secara maksimal. Pada tahun 2020 selisihnya kembali naik sebesar Rp.498.008,068, dan pada tahun 2021 menurun secara signifikan sebesar Rp.256.042.043 disebabkan maksimalnya penyerapan dana dan program kerja yang terealisasi.

Jika dibandingkan dari tahun 2017-2021, tahun 2018 mempunyai selisih terbanyak diantara tahun lainnya dan selisish yang paling sedikit adalah pada tahun 2021. Penganggaran yang berpacu pada tahun anggran sebelumnya dapat dipengaruhi oleh beberapa kemungkinan seperti bertambahnya belanja yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan kantor, naiknya kurs rupiah serta kenaikan-kenaikan lainnya yang menyebabkan bertambahnya nilai anggaran. Kadang realisasi dengan penganggaran tidak sesuai sehingga akan lebih sering mengalami varian disukai. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja anggaran kantor pertanahan kabupaten bantaeng dapat dikatakan baik karena dapat melakukan penghematan anggaran.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Ulfah et al., 2018) yang menggunakan rasio analisis varians belanja untuk mengukur belanja dalam laporan realisasi anggran.

### 3. Rasio efesiensi belanja

Berdasarkan hasil perhitungan analisis efesiensi belanja menunjukkan bahwa laporan realisasi belanja kantor pertanahan cenderung kurang efisien. Dilihat pada tahun 2017 presentase realisasi anggarannya sebesar 87,83% yang dapat dikatakan cukup efisien karena kantor pertanahan kabupaten bantaeng berusaha melakukan penghematan anggaran dengan menekan biaya pengeluaran serendah-rendahnya.

Pada tahun 2018 nilai presentase mengalami kenaikan sebesar 90,36%, dikatakan kurang efisien, karena bertambahnya belanja barang dan belanja lainnya, pada tahun 2019 presentase realisasi belanja meningkat hingga 93,02%, karena penggunaan anggaran belanja yang tinggi, presentase pada tahun 2020 mengalami sedikit penurunan sebesar 92,46 karena adanya penyisihan anggaran dalam kegiatan tertentu. pada tahun 2021 presentase mengalami kenaikan secara signifikan sebesar 96,44% dan dalam kriteria kurang efisien karena banyaknya program kerja yang belum terealisasi pada tahun sebelumnya yang membuat kantor pertanahan kabupaten bantaeng menambah anggaran.

Dari kelima tahun tersebut bisa dilihat tingkat kriteria efisiensi anggaran belanja secara keseluruhan kurang efisien dikarenakan penggunaan anggaran belanja yang terlalu tinggi dan program kerja yang belum terealisasi pada tahun sebelumnya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ruliaty, Ismail Badollahi, 2019) yang menggunakan rasio efisiensi belanja untuk mengukur tingkat efisiensi belanja pemerintah kabupaten bone.

#### 4. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Berdasarkan hasil perhitungan rasio lancar pada tabel 4.7 diatas, menunjukkan bahwa pada tahun 2017 nilai persentase sebesar 163,21 dimana pada tahun 2010 jumlah utang lancar



		meningkat secara signifikan dengan nilai persentase sebesar 90% meskipun pada tahun 2018 dan 2019 anggaran belanja modal dialokasikan ke belanja operasi.	
2.	Analisis Varians Belanja	Hasil analisis laporan keuangan menggunakan metode analisis varians belanja menunjukkan bahwa anggaran yang terealisasi tidak lebih dari yang dianggarkan hal tersebut termasuk kategori varian di sukai atau <i>favourable variance</i>	Baik
3.	Rasio Efisiensi Belanja	Hasil analisis laporan keuangan menggunakan metode rasio efisiensi belanja menunjukkan bahwa tingkat keefisienan belanja kantor pertanahan termasuk dalam kategori kurang efisien, dengan rata-rata nilai persentasenya sebesar 100% pada periode 2017-2021. Meskipun ada peningkatan dalam pengelolaan anggaran belanja dari tahun ke tahun akan tetapi masih dalam kategori kurang efisien. Persentase tahun 2017 sebesar 114% dan pada tahun 2021 sebesar 104%	Kurang baik
4.	Rasio Lancar ( <i>Current Ratio</i> )	Hasil analisis laporan keuangan menggunakan metode rasio lancar menunjukkan bahwa pada periode 2017-2021 dapat dikatakan baik, karena kantor pertanahan mampu melunasi semua hutang jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancarnya dengan rata-rata nilai persentasenya sebesar 8% meskipun pada tahun 2020 dan 2021 nilai persentasenya menurun secara signifikan akan tetapi masih dikatakan baik karna nilai persentasenya belum kurang dari 1%.	Baik

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa dari hasil analisis laporan keuangan berdasarkan metode analisis keserasian menunjukkan bahwa pada tahun 2017-2021 rata-rata nilai persentasenya sebesar 90% hal tersebut dikatakan kurang baik. Metode varians belanja menunjukkan bahwa tidak ada yang melebihi dari yang dianggarkan hal tersebut dikatakan vairian disukai. Rasio efesiensi belanja menunjukkan bahwa periode 2017-2021 tingkat keefisienan belanja kantor pertanahan masuk dalam kategori kurang efisien karena rata-rata nilai persentasenya sebesar 100%. Metode rasio lancar menunjukkan bahwa kantor pertanahan mampu melunasi hutang jangka pendeknya dengan nilai persentase tidak ada yang kurang dari 1%.

#### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian pada badan pertanahan nasional (BPN) kabupaten bantaeng periode 2017-2021, diatas maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Bagi organisasi, diharapkan dapat memperbaiki dan mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk belanja modal dan belanja operasi agar kedepannya bisa lebih efisien, dan semoga dibuatnya skripsi ini bisa menjadi masukan yang positif dan membangun.

2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambah jumlah variabel penelitian untuk kedepannya agar dapat memperoleh hasil penelitian yang lengkap dan lebih baik lagi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aldy H.R pangkei, ivonne S. saerang, J. E. T. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2011-2015. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 5(2), 2848–2858.
- Amping, F., Hafied, I., & Iskandar, S. (2020). Laporan Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan. *ACCOUNTING JOURNAL*, 238–244. <http://ojs.stkip-yupup.ac.id/index.php/SA/article/view/306>
- Anshori, Z. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016 – 2018. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi (JPENSI)*, 4 No. 2, J(2), 1113–1132.
- Fajriansyah, Y., Elim, I., Walandouw, S. K., Ekonomi, F., & Akuntansi, J. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Bitung Tahun Anggaran 2016 – 2017. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(3), 4465–4474. <https://doi.org/10.35794/emba.v7i3.25146>
- Farida, A. S., & Nugraha, R. F. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang 1 Ai Siti Farida, 2 Raden Faisal Maulana Nugraha 1. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 11(2), 107–124.
- Farizky, D. Al. (2018). Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik MENLAI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH ( Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran David Al Farizky Program Studi Akuntansi , Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. *Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggran 2015-2018)*, 4, 1–13. <http://repository.untag-sby.ac.id>
- Harahap, H. F. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 34. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.87>
- Karlina, A., & Handayani, N. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan APBD Di Kota Surabaya Tahun 2012-2015. *Jurnal. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA)*, 6(3), 910–924.
- Polii, J. C., Sabijono, H., Elim, I., Laporan, A., Kas, A., Menilai, U., & Keuangan, K. (2019). Analisis Laporan Arus Kas Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Telekomunikasi Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(3), 4096–4105. <https://doi.org/10.35794/emba.v7i3.24949>
- Prakosa, septyo dwi. (2018). Analisis Laporan Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan Publik Industri Sub Sektor Semen Di PT. BEI. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 7(1), 15–30.

- Priharjanto, A., & Andriana, N. (2020). Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan, Kapasitas Sumber Daya Manusia, dan Aksesibilitas terhadap Pemanfaatan Laporan Keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 13(1), 39. <https://doi.org/10.35448/jrat.v13i1.7548>
- Ratnasari, W., & Munawaroh, S. (2019). Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (Lra) Pada Dinas Sosial Kabupaten Berau. *JEMMA / Journal of Economic, Management and Accounting*, 2(1), 49. <https://doi.org/10.35914/jemma.v2i1.142>
- Rukayah, Kusumawati, N., & Afriani, R. I. (2017). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Dengan Menggunakan Rasio Efektivitas Dan Rasio Efisiensi Pada Kantor Badan Perijinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Serang. *Jurnal Akuntansi*, 4(2), 1–11. <https://ejournal.lppmunsera.org/index.php/Akuntansi/article/view/246>
- Ruliaty, Ismail Badollahi, A. I. N. (2019). Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone. *Jurnal Ekonomi Invoice Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 40–66.
- Safitri, K., Handayani, S., Ekonomi, F., Surabaya, U. N., Ekonomi, F., & Surabaya, U. N. (2020). *Dampak kinerja keuangan dalam memediasi hubungan corporate governance dan nilai perusahaan*. 09(01).
- Sari, I. I., & Yousida, I. (2019). Analisis Laporan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 5(1), 129–142. <https://doi.org/10.35972/jieb.v5i1.264>
- Ulfah, S. A., Politeknik, D. A., & Bersama, H. (2018). *Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Brebes*. 1–7.

# LAMPIRAN

## Lampiran 1. Surat izin penelitian

	<b>MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR</b> LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 E-mail: ip3mumuh@plama.com	
<p style="text-align: center;">بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ</p>		
Nomor :	1449/05/C.4-VIII/IV/40/2022	15 Ramadhan 1443 H
Lamp :	1 (satu) Rangkap Proposal	16 April 2022 M
Hal :	Permohonan Izin Penelitian	
	<i>Kepada Yth,</i> Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sul-Sel di – Makassar	
	<p style="text-align: center;">بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ</p> Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 831/05/A.2-II/TV/1443/2022 tanggal 16 April 2022, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :	
	Nama : <b>ALAM NURSANDI</b> No. Stambuk : <b>10573 1105518</b> Fakultas : <b>Fakultas Ekonomi dan Bisnis</b> Jurusan : <b>Akuntansi</b> Pekerjaan : <b>Mahasiswa</b>	
	Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :	
	<b>"Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik Pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bantaeng"</b>	
	Yang akan dilaksanakan dari tanggal 20 April 2022 s/d 20 Juni 2022.	
	Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.	
	Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.	
	<p style="text-align: center;">بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ</p>	
	Ketua LP3M,  <b>Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.</b> NBM 101 7716	

04-22



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
Makassar 90231

Nomor : **36/S.01/PTSP/2022**  
Lampiran : -  
Perihal : **Izin penelitian**

**Kepada Yth.**  
Bupati Bantaeng

di-  
**Tempat**

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 1449/05/C.4-VIII/IV/40/2022 tanggal 16 April 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **ALAM NURSANDI**  
Nomor Pokok : 105731105518  
Program Studi : Akuntansi  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)  
Alamat : Jl. Slt Alauddin No. 259, Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN  
Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" ANALISIS LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN BANTAENG "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **26 April s/d 20 Juni 2022**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada Tanggal 25 April 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



**Dra. Hj SUKARNIATY KONDOLELE, M.M.**  
Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA  
Nip : 19650606 199003 2 011

Tembusan Yth  
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;  
2. *Pertinggal.*



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

Alamat : Jl. Kartini No. 2, Kab. Bantaeng, email : dpmptsp.bantaengkab@gmail.com, website : dpmptsp.bantaengkab.go.id

**IZIN PENELITIAN**

NOMOR : 503/112/IPL/DPM-PTSP/IV/2022

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mendagri Nomor 7 Tahun 2014;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 57 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Administrasi Perizinan dan Non Perizinan.

**MEMBERIKAN IZIN KEPADA**

Nama : ALAMNURSANDI  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 N I M : 105731105518  
 No. KTP : 7303020512000007  
 Program Studi : Akuntansi  
 Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar  
 Alamat : Kamp. Pabineang Kec. Bantaeng Kabupaten Bantaeng

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :  
**"Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik Pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bantaeng"**

Lokasi Penelitian : Kantor Agraria & Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)

Lama Penelitian : 09 Mei 2022 s.d. 20 Juni 2022

Sehubungan dengan hal tersebut diatas pada prinsipnya kami dapat **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudahnya melaksanakan kegiatan, yang bersangkutan harus melapor kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan;
3. Mentaati semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat- istiadat Daerah setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil Penelitian kepada Bupati Bantaeng Cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Bantaeng;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



1 2 0 2 2 1 9 0 0 9 0 0 0 1 1 6



Diterbitkan di Kabupaten Bantaeng  
 Pada tanggal : 26 April 2022

a.n. **BUPATI BANTAENG**  
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP,



**YOHANIS PHR ROMUTI, S.IP**  
 Pangkat : Pembina TK. I  
 NIP : 19750710 199311 1 001



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTAENG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Jalan Andi Manappiang No.8 – Bantaeng Telp/Fax. (0413) 23043 email:kab-bantaeng@atrbpn.go.id

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

Nomor : UP.02.03/418-73.03/V/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Adri Virly Rachman, S.ST  
NIP : 197812131998031003  
Jabatan : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ALAM NURSANDI  
NIM : 105731105518  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik Pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bantaeng

**BENAR** yang namanya tersebut diatas telah melaksanakan penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng terhitung mulai tanggal 09 Mei 2022 s/d 30 Mei 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantaeng, 30 Mei 2022

Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten Bantaeng,

Adri Virly Rachman, S.ST  
NIP. 197812131998031003



## Lampiran 2. Laporan realisasi anggaran tahun 2017-2021

### LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN 056  
ESELON I : SEKRETARIAT JENDERAL 01  
SATUAN KERJA : KANTOR PERTANAHAN KAB. BANTA ENG 431824

Kode Lap : LRA.F.S  
Tanggal : 22/05/22 10:50 PM  
Halaman : 1  
Prg ID : lap\_lra\_face\_saiker\_komparatif--

NO	URAIAN	2017				2016			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH</b>				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	2,600,000	2,600,000	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH</b>	<b>0</b>	<b>2,600,000</b>	<b>2,600,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>BELANJA</b>				0				0
	BELANJA PEGAWAI	1,929,910,000	1,885,722,981	(44,187,019)	98	1,880,796,000	1,849,764,763	(31,031,237)	98
	BELANJA BARANG	2,003,294,000	1,568,977,722	(434,316,278)	78	1,526,083,000	1,300,351,769	(225,731,231)	85
	BELANJA MODAL	186,125,000	163,363,600	(22,761,400)	88	632,018,000	607,833,648	(24,184,352)	96
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>JUMLAH BELANJA (B I + B II)</b>	<b>4,119,329,000</b>	<b>3,618,064,303</b>	<b>(501,264,697)</b>	<b>88</b>	<b>4,038,897,000</b>	<b>3,757,950,180</b>	<b>(280,946,820)</b>	<b>88</b>
<b>C</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				0				0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017  
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BNP 056

ESELON I : SEKRETARIAT JENDERAL 01

SATUAN KERJA : KANTOR PERTANAHAN KAB. BANTA ENG 431824

Kode Lap : LRA.F.S

Tanggal : 22/05/22 10:51 PM

Halaman : 1

Prg ID : lap\_lra\_face\_satker\_komparatif --

NO	URAIAN	2018				2017			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH</b>				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	555,210	555,210	0	0	2,600,000	2,600,000	0
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH</b>	<b>0</b>	<b>555,210</b>	<b>555,210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,600,000</b>	<b>2,600,000</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>BELANJA</b>				0				0
	BELANJA PEGAWAI	2,006,585,000	1,869,704,298	(136,880,702)	93	1,929,910,000	1,885,722,981	(44,187,019)	98
	BELANJA BARANG	4,010,880,000	3,567,928,986	(442,951,014)	89	2,003,294,000	1,568,977,722	(434,316,278)	78
	BELANJA MODAL	0	0	0	0	186,125,000	163,363,600	(22,761,400)	88
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>JUMLAH BELANJA (B I + B II)</b>	<b>6,017,465,000</b>	<b>5,437,633,284</b>	<b>(579,831,716)</b>	<b>90</b>	<b>4,119,329,000</b>	<b>3,618,064,303</b>	<b>(501,264,697)</b>	<b>88</b>
<b>C</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				0				0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**  
**(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN 056

ESELON I : SEKRETARIAT JENDERAL 01

SATUAN KERJA : KANTOR PERTANAHAN KAB. BANTA ENG 431824

Kode Lap : LRAF.S

Tanggal : 22/05/22 10:55 PM

Halaman : 1

Prg ID : lap\_lra\_face\_satker\_komparatif --

NO	URAIAN	2019				2018			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH</b>				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	249	249	0	0	555,210	555,210	0
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH</b>	<b>0</b>	<b>249</b>	<b>249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>555,210</b>	<b>555,210</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>BELANJA</b>				0				0
	BELANJA PEGAWAI	1,957,924,000	1,835,719,991	(122,204,009)	94	2,006,585,000	1,869,704,298	(136,880,702)	93
	BELANJA BARANG	4,721,973,000	4,378,207,310	(343,765,690)	93	4,010,880,000	3,567,928,986	(442,951,014)	89
	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>JUMLAH BELANJA (B I + B II)</b>	<b>6,679,897,000</b>	<b>6,213,927,301</b>	<b>(465,969,699)</b>	<b>93</b>	<b>6,017,465,000</b>	<b>5,437,633,284</b>	<b>(579,831,716)</b>	<b>90</b>
<b>C</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				0				0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**  
**(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN 056  
 ESELON I : SEKRETARIAT JENDERAL 01  
 SATUAN KERJA : KANTOR PERTANAHAN KAB. BANTA ENG 431824

Kode Lap : LRA.F.S  
 Tanggal : 22/05/22 10:56 PM  
 Halaman : 1  
 Prg ID : lap\_ira\_face\_satker\_komparatif --

NO	URAIAN	2020				2019			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH</b>				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	1,480,000	1,480,000	0	0	249	249	0
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH</b>	<b>0</b>	<b>1,480,000</b>	<b>1,480,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249</b>	<b>249</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>BELANJA</b>				0				0
	BELANJA PEGAWAI	2,156,125,000	1,894,494,753	(261,630,247)	88	1,957,924,000	1,835,719,991	(122,204,009)	94
	BELANJA BARANG	4,433,245,000	4,198,407,179	(234,837,821)	95	4,721,973,000	4,378,207,310	(343,765,690)	93
	BELANJA MODAL	23,524,000	21,984,000	(1,540,000)	93	0	0	0	0
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>JUMLAH BELANJA (B I + B II)</b>	<b>6,612,894,000</b>	<b>6,114,885,932</b>	<b>(498,008,068)</b>	<b>92</b>	<b>6,679,897,000</b>	<b>6,213,927,301</b>	<b>(465,969,699)</b>	<b>93</b>
<b>C</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				0				0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN 056

ESELON I : SEKRETARIAT JENDERAL 01

SATUAN KERJA : KANTOR PERTANAHAN KAB. BANTA ENG 431824

Kode Lap : LRA.F.S

Tanggal : 22/05/22 10:42 PM

Halaman : 1

Prg ID : lap\_lra\_face\_satker\_komparatif --

NO	URAIAN	2021				2020			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH</b>				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	463	463	0	0	1,480,000	1,480,000	0
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH</b>	<b>0</b>	<b>463</b>	<b>463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,480,000</b>	<b>1,480,000</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>BELANJA</b>				0				0
	BELANJA PEGAWAI	2,022,961,000	1,998,189,765	(24,771,235)	99	2,156,125,000	1,894,494,753	(261,630,247)	88
	BELANJA BARANG	5,084,109,000	4,855,949,992	(228,159,008)	96	4,433,245,000	4,198,407,179	(234,837,821)	95
	BELANJA MODAL	90,668,000	87,556,200	(3,111,800)	97	23,524,000	21,984,000	(1,540,000)	93
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>JUMLAH BELANJA (B I + B II)</b>	<b>7,197,738,000</b>	<b>6,941,695,957</b>	<b>(256,042,043)</b>	<b>96</b>	<b>6,612,894,000</b>	<b>6,114,885,932</b>	<b>(498,008,068)</b>	<b>96</b>
<b>C</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				0				0

### Lampiran 3. Laporan Keuangan Neraca tahun 2017-2021

**NERACA**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER DESEMBER 2017 DAN 2016**  
**(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 056                      KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN  
UNIT ORGANISASI                      : 01                      SEKRETARIAT JENDERAL  
KDUAPPAW                                : 056011900KD      BA(056) ES1(01) SULAWESI SELATAN  
KODE SATKER                             : 431824              KANTOR PERTANAHAN KAB. BANTA ENG

Tgl. Cetak 22/05/2022 10:49 PM  
lap\_neraca\_satker\_komparatif --rekon17

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2017	2016	Jumlah	%
1	2	3	4	5
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Persediaan	114,908,418	14,860,192	100,048,226	673.26
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>114,908,418</b>	<b>14,860,192</b>	<b>100,048,226</b>	<b>673.26</b>
<b>ASET TETAP</b>				
Tanah	3,862,849,000	379,870,000	3,482,979,000	916.89
Peralatan dan Mesin	1,796,639,895	1,749,969,895	46,670,000	2.67
Gedung dan Bangunan	3,435,780,000	1,899,286,348	1,536,493,652	80.90
Jalan, Irigasi dan Jaringan	21,504,457	21,504,457	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	298,436,600	210,443,000	87,993,600	41.81
AKUMULASI PENYUSUTAN	(1,464,345,304)	(1,858,308,946)	393,963,642	(21.20)
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>7,950,864,648</b>	<b>2,402,764,754</b>	<b>5,548,099,894</b>	<b>230.90</b>
<b>ASET LAINNYA</b>				
Aset Lain-lain	153,969,774	153,969,774	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(153,859,909)	(153,640,173)	(219,730)	0.14
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>109,865</b>	<b>329,595</b>	<b>(219,730)</b>	<b>(66.67)</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>8,065,882,931</b>	<b>2,417,954,541</b>	<b>5,647,928,390</b>	<b>233.58</b>
<b>KEWAJIBAN</b>				
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>				
Utang kepada Pihak Ketiga	704,020	662,000	42,020	6.35
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>704,020</b>	<b>662,000</b>	<b>42,020</b>	<b>6.35</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>704,020</b>	<b>662,000</b>	<b>42,020</b>	<b>6.35</b>
<b>EKUITAS</b>				
<b>EKUITAS</b>				
Ekuitas	8,065,178,911	2,417,292,541	5,647,886,370	233.65
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>8,065,178,911</b>	<b>2,417,292,541</b>	<b>5,647,886,370</b>	<b>233.65</b>
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>8,065,178,911</b>	<b>2,417,292,541</b>	<b>5,647,886,370</b>	<b>233.65</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>8,065,882,931</b>	<b>2,417,954,541</b>	<b>5,647,928,390</b>	<b>233.58</b>

**NERACA**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER DESEMBER 2018 DAN 2017**  
**(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 056                      KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN  
 UNIT ORGANISASI                      : 01                      SEKRETARIAT JENDERAL  
 KDUAPPAW                                : 056011900KD      BA(056) ES1(01) SULAWESI SELATAN  
 KODE SATKER                            : 431824              KANTOR PERTANAHAN KAB. BANTA ENG

Tgl. Cetak 22/05/2022 10:51 PM  
 lap\_neraca\_satker\_komparatif--rekon17

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2018	2017	Jumlah	%
1	2	3	4	5
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Persediaan	9.863,316	114.908,418	(105.045,102)	(91.42)
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>9.863,316</b>	<b>114.908,418</b>	<b>(105.045,102)</b>	<b>(91.42)</b>
<b>ASET TETAP</b>				
Tanah	3.862.849,000	3.862.849,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	1.980.015,263	1.796.639,895	183.375,368	10.21
Gedung dan Bangunan	3.435.780,000	3.435.780,000	0	0.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	21.504,457	21.504,457	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	298.436,600	298.436,600	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(1.731.772,922)	(1.464.345,304)	(267.427,618)	18.26
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>7.866,812,398</b>	<b>7.950,864,648</b>	<b>(84,052,250)</b>	<b>(1.06)</b>
<b>ASET LAINNYA</b>				
Aset Lain-lain	153.969,774	153.969,774	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(153.969,774)	(153.859,906)	(109,865)	0.07
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>0</b>	<b>109,865</b>	<b>(109,865)</b>	<b>(100.00)</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>7.876,675,714</b>	<b>8.065,882,931</b>	<b>(189,207,217)</b>	<b>(2.35)</b>
<b>KEWAJIBAN</b>				
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>				
Utang kepada Pihak Ketiga	1.127,900	704,020	423,880	60.21
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>1.127,900</b>	<b>704,020</b>	<b>423,880</b>	<b>60.21</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>1.127,900</b>	<b>704,020</b>	<b>423,880</b>	<b>60.21</b>
<b>EKUITAS</b>				
<b>EKUITAS</b>				
Ekuitas	7.875,547,814	8.065,178,911	(189,631,097)	(2.35)
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>7.875,547,814</b>	<b>8.065,178,911</b>	<b>(189,631,097)</b>	<b>(2.35)</b>
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>7.875,547,814</b>	<b>8.065,178,911</b>	<b>(189,631,097)</b>	<b>(2.35)</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>7.876,675,714</b>	<b>8.065,882,931</b>	<b>(189,207,217)</b>	<b>(2.35)</b>

**NERACA**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER DESEMBER 2019 DAN 2018**  
**(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 056                      KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN  
 UNIT ORGANISASI : 01                                      SEKRETARIAT JENDERAL  
 KDUAPPAW : 056011900KD BA(056) ES1(01) SULAWESI SELATAN  
 KODE SATKER : 431824                                    KANTOR PERTANAHAN KAB. BANTA ENG

Tgl. Cetak 22/05/2022 10:55 PM  
 lap\_neraca\_satker\_komparatif --rekon17

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2019	2018	Jumlah	%
1	2	3	4	5
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Persediaan	21,329,308	9,863,316	11,465,992	116.25
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>21,329,308</b>	<b>9,863,316</b>	<b>11,465,992</b>	<b>116.25</b>
<b>ASET TETAP</b>				
Tanah	3,862,099,000	3,862,849,000	(750,000)	(0.02)
Peralatan dan Mesin	2,166,285,263	1,980,015,263	186,270,000	9.41
Gedung dan Bangunan	3,211,069,000	3,435,780,000	(224,711,000)	(6.54)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	21,504,457	21,504,457	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	298,436,600	298,436,600	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(2,012,105,576)	(1,731,772,922)	(280,332,654)	16.19
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>7,547,288,744</b>	<b>7,866,812,398</b>	<b>(319,523,654)</b>	<b>(4.06)</b>
<b>ASET LAINNYA</b>				
Aset Lain-lain	153,969,774	153,969,774	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(153,969,774)	(153,969,774)	0	0.00
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>7,568,618,052</b>	<b>7,876,675,714</b>	<b>(308,057,662)</b>	<b>(3.91)</b>
<b>KEWAJIBAN</b>				
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>				
Utang kepada Pihak Ketiga	2,536,100	1,127,900	1,408,200	124.85
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>2,536,100</b>	<b>1,127,900</b>	<b>1,408,200</b>	<b>124.85</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>2,536,100</b>	<b>1,127,900</b>	<b>1,408,200</b>	<b>124.85</b>
<b>EKUITAS</b>				
<b>EKUITAS</b>				
Ekuitas	7,566,081,952	7,875,547,814	(309,465,862)	(3.93)
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>7,566,081,952</b>	<b>7,875,547,814</b>	<b>(309,465,862)</b>	<b>(3.93)</b>
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>7,566,081,952</b>	<b>7,875,547,814</b>	<b>(309,465,862)</b>	<b>(3.93)</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>7,568,618,052</b>	<b>7,876,675,714</b>	<b>(308,057,662)</b>	<b>(3.91)</b>

**NERACA**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER DESEMBER 2020 DAN 2019**  
**(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 056                      KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN  
UNIT ORGANISASI                      : 01                      SEKRETARIAT JENDERAL  
KDUAPPAW                                : 056011900KD      BA(056) ES1(01) SULAWESI SELATAN  
KODE SATKER                             : 431824              KANTOR PERTANAHAN KAB. BANTA ENG

Tgl. Cetak 22/05/2022 10:56 PM  
lap\_neraca\_satker\_komparatif --rekon17

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2020	2019	Jumlah	%
1	2	3	4	5
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Persediaan	19,376,290	21,329,308	(1,953,018)	(9.16)
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>19,376,290</b>	<b>21,329,308</b>	<b>(1,953,018)</b>	<b>(9.16)</b>
<b>ASET TETAP</b>				
Tanah	3,861,814,000	3,862,099,000	(285,000)	(0.01)
Peralatan dan Mesin	2,371,233,958	2,166,285,263	204,948,695	9.46
Gedung dan Bangunan	2,965,266,000	3,211,069,000	(245,803,000)	(7.65)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	21,504,457	21,504,457	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	320,420,600	298,436,600	21,984,000	7.37
AKUMULASI PENYUSUTAN	(2,329,319,636)	(2,012,105,576)	(317,214,060)	15.77
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>7,210,919,379</b>	<b>7,547,288,744</b>	<b>(336,369,365)</b>	<b>(4.46)</b>
<b>ASET LAINNYA</b>				
Aset Lain-lain	153,969,774	153,969,774	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(153,969,774)	(153,969,774)	0	0.00
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>7,230,295,669</b>	<b>7,568,618,052</b>	<b>(338,322,383)</b>	<b>(4.47)</b>
<b>KEWAJIBAN</b>				
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>				
Utang kepada Pihak Ketiga	25,137,216	2,536,100	22,601,116	891.18
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>25,137,216</b>	<b>2,536,100</b>	<b>22,601,116</b>	<b>891.18</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>25,137,216</b>	<b>2,536,100</b>	<b>22,601,116</b>	<b>891.18</b>
<b>EKUITAS</b>				
<b>EKUITAS</b>				
Ekuitas	7,205,158,453	7,566,081,952	(360,923,499)	(4.77)
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>7,205,158,453</b>	<b>7,566,081,952</b>	<b>(360,923,499)</b>	<b>(4.77)</b>
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>7,205,158,453</b>	<b>7,566,081,952</b>	<b>(360,923,499)</b>	<b>(4.77)</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>7,230,295,669</b>	<b>7,568,618,052</b>	<b>(338,322,383)</b>	<b>(4.47)</b>

**NERACA**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER DESEMBER 2021 DAN 2020**  
**(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 056                      KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN  
 UNIT ORGANISASI                      : 01                      SEKRETARIAT JENDERAL  
 KDUAPPAW                              : 056011900KD      BA(056) ES1(01) SULAWESI SELATAN  
 KODE SATKER                          : 431824              KANTOR PERTANAHAN KAB. BANTA ENG

Tgl. Cetak 22/05/2022 10:41 PM  
 lap\_neraca\_satker\_komparatif --rekon17

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2021	2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	4,781,333	0	4,781,333	0.00
Persediaan	5,490,010	19,376,290	(13,886,280)	(71.67)
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>10,271,343</b>	<b>19,376,290</b>	<b>(9,104,947)</b>	<b>(46.99)</b>
<b>ASET TETAP</b>				
Tanah	3,861,814,000	3,861,814,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	2,441,162,958	2,371,233,958	69,929,000	2.95
Gedung dan Bangunan	2,965,265,000	2,965,266,000	0	0.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	21,504,457	21,504,457	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	407,976,800	320,420,600	87,556,200	27.33
AKUMULASI PENYUSUTAN	(2,637,624,345)	(2,329,319,636)	(308,304,709)	13.24
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>7,060,099,870</b>	<b>7,210,919,379</b>	<b>(150,819,509)</b>	<b>(2.09)</b>
<b>ASET LAINNYA</b>				
Aset Lain-lain	153,969,774	153,969,774	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(153,969,774)	(153,969,774)	0	0.00
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>7,070,371,213</b>	<b>7,230,295,669</b>	<b>(159,924,456)</b>	<b>(2.21)</b>
<b>KEWAJIBAN</b>				
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>				
Utang kepada Pihak Ketiga	12,653,800	25,137,216	(12,483,416)	(49.66)
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>12,653,800</b>	<b>25,137,216</b>	<b>(12,483,416)</b>	<b>(49.66)</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>12,653,800</b>	<b>25,137,216</b>	<b>(12,483,416)</b>	<b>(49.66)</b>
<b>EKUITAS</b>				
<b>EKUITAS</b>				
Ekuitas	7,057,717,413	7,205,158,453	(147,441,040)	(2.05)
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>7,057,717,413</b>	<b>7,205,158,453</b>	<b>(147,441,040)</b>	<b>(2.05)</b>
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>7,057,717,413</b>	<b>7,205,158,453</b>	<b>(147,441,040)</b>	<b>(2.05)</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>7,070,371,213</b>	<b>7,230,295,669</b>	<b>(159,924,456)</b>	<b>(2.21)</b>

## Lampiran 4. Hasil perhitungan rasio keuangan

### 1. Analisis Keserasian

#### a. Rasio belanja operasi terhadap total belanja

Tabel perhitungan rasio belanja operasi terhadap total belanja

Tahun	Belanja operasi	Anggaran	Rasio%
[1]	(Rp)	(Rp)	[2/3 X 100]
	[2]	[3]	
2017	3,454,700,703	3,933,204,000	87,83
2018	5,437,633,284	6,017,465,000	90,36
2019	6,213,927,301	6,679,897,000	93,02
2020	6,092,901,932	6,589,370,000	92,46
2021	6,884,139,757	7,107,070,000	96,86

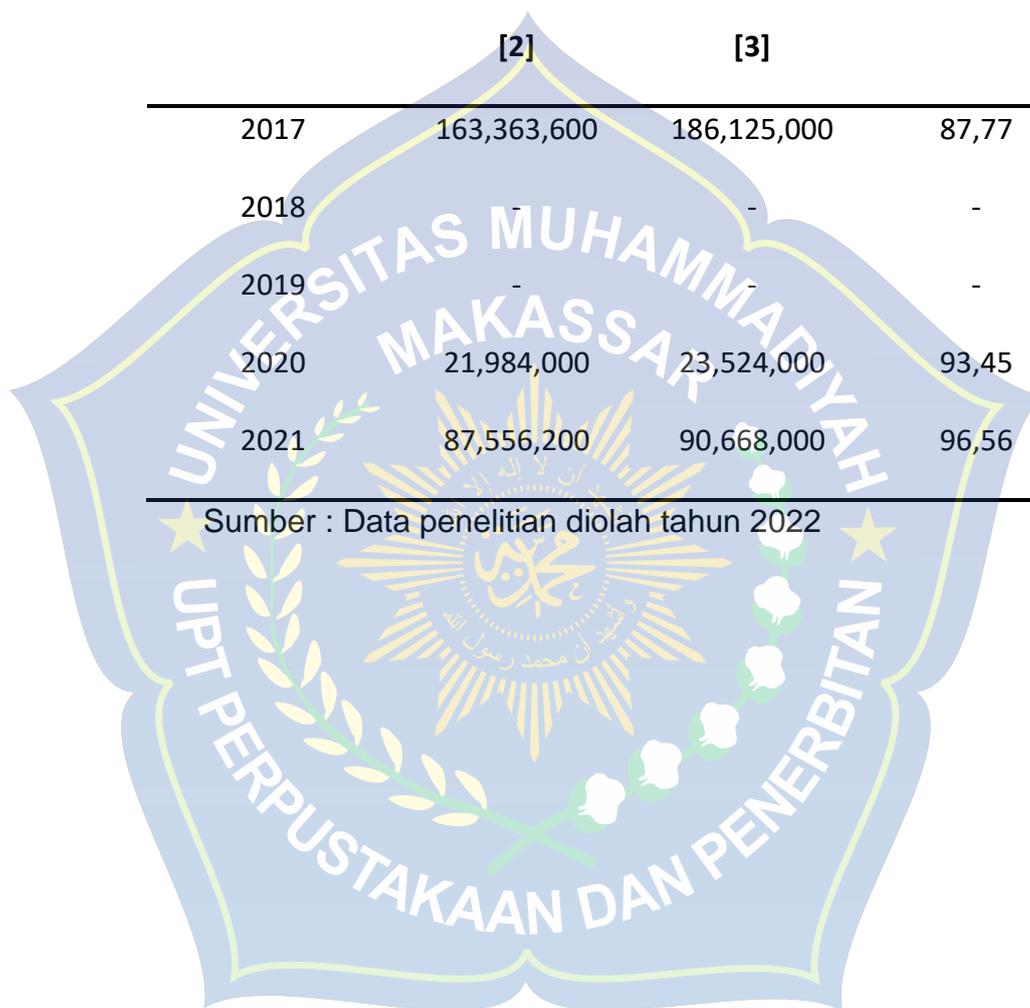
Sumber : Data penelitian diolah tahun 2022

## b. Rasio belanja modal terhadap total belanja

Tabel perhitungan rasio belanja modal terhadap total belanja

Tahun	Belanja Modal	Anggaran	Rasio%
[1]	(Rp)	(Rp)	[2/3 X 100]
	[2]	[3]	
2017	163,363,600	186,125,000	87,77
2018	-	-	-
2019	-	-	-
2020	21,984,000	23,524,000	93,45
2021	87,556,200	90,668,000	96,56

Sumber : Data penelitian diolah tahun 2022



## 2. Analisis Varians Belanja

Tabel perhitungan analisis varians belanja

	Realisasi	Anggaran	Selisih
Tahun	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	[a]	[b]	[a]-[b]
2017	3,618,064,303	4,119,329,000	(501,264,697)
2018	5,437,633,284	6,017,465,000	(579,831,716)
2019	6,213,927,301	6,679,897,000	(465,969,699)
2020	6,114,885,932	6,612,894,000	(498,008,068)
2021	6,941,695,957	7,197,738,000	(256,042,043)

Sumber : Data penelitian diolah tahun 2022

Tabel kriteria Penilaian Varians

Tahun	Varians	Kriteria
2017	Realisasi < Anggaran	Disukai
2018	Realisasi < Anggaran	Disukai
2019	Realisasi < Anggaran	Disukai
2020	Realisasi < Anggaran	Disukai
2021	Realisasi < Anggaran	Disukai

### 3. Rasio Efisiensi Belanja

Tabel perhitungan rasio efisiensi belanja

Tahun	Anggaran belanja	Realisasi belanja	Persentase (%)
	(Rp)	(Rp)	[d/c x 100%]
	[c]	[d]	
2017	4,119,329,000	3,618,064,303	114%
2018	6,017,465,000	5,437,633,284	111%
2019	6,679,897,000	6,213,927,301	107%
2020	6,612,894,000	6,114,885,932	108%
2021	7,197,738,000	6,941,695,957	104%

Sumber : Data penelitian diolah tahun 2022

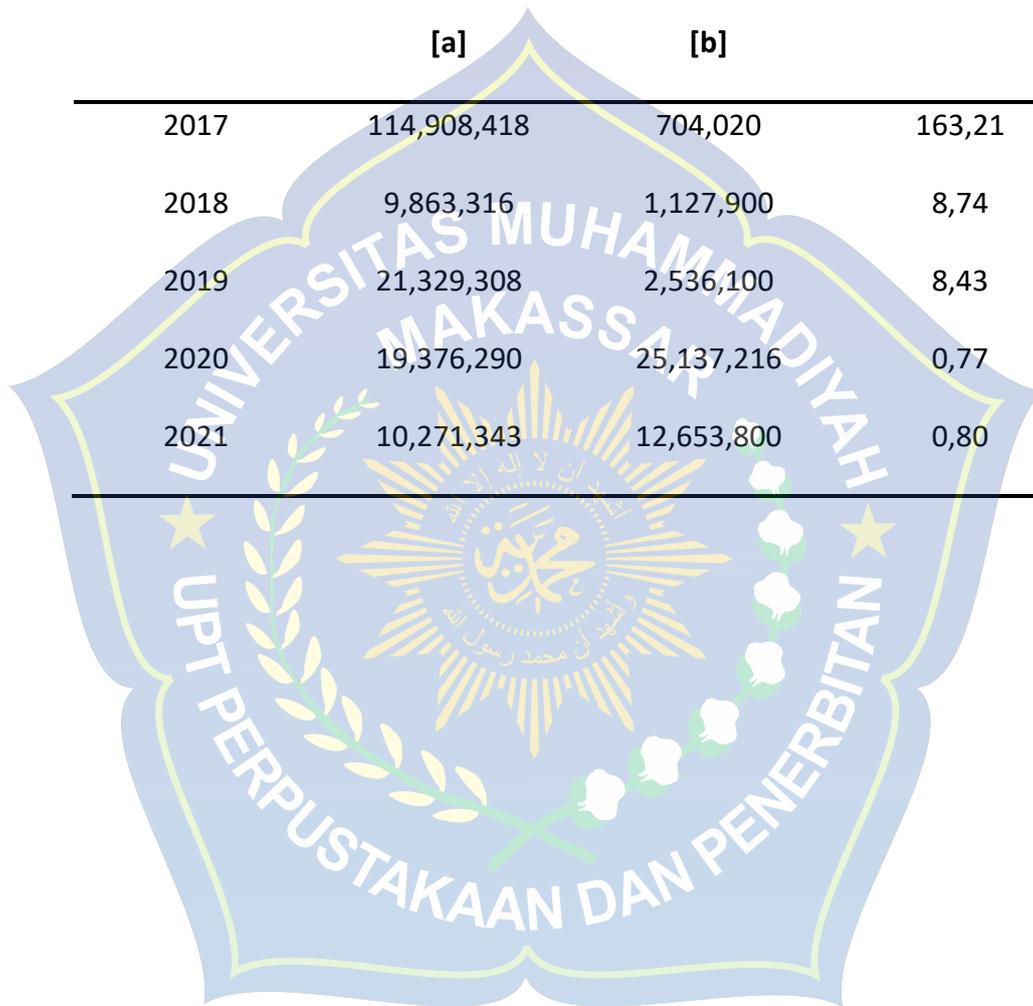
Tabel kriteria efisiensi belanja

Tahun	Persentase(%)	Kriteria
2017	114%	Kurang Efisien
2018	111%	Kurang Efisien
2019	107%	Kurang Efisien
2020	108%	Kurang Efisien
2021	104%	Kurang Efisien

#### 4. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Tabel perhitungan rasio lancar

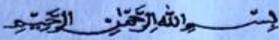
	Aktiva Lancar	Hutang lancar	Rasio Lancar(%)
Tahun	(Rp)	(Rp)	[a/b]
	[a]	[b]	
2017	114,908,418	704,020	163,21
2018	9,863,316	1,127,900	8,74
2019	21,329,308	2,536,100	8,43
2020	19,376,290	25,137,216	0,77
2021	10,271,343	12,653,800	0,80



## Lampiran 5. Bukti Tes Plagiasi


**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**  
 Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

---

  
**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,**  
**Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Alam Nursandi  
 NIM : 105731105518  
 Program Studi : Akuntansi

Dengan nilai:

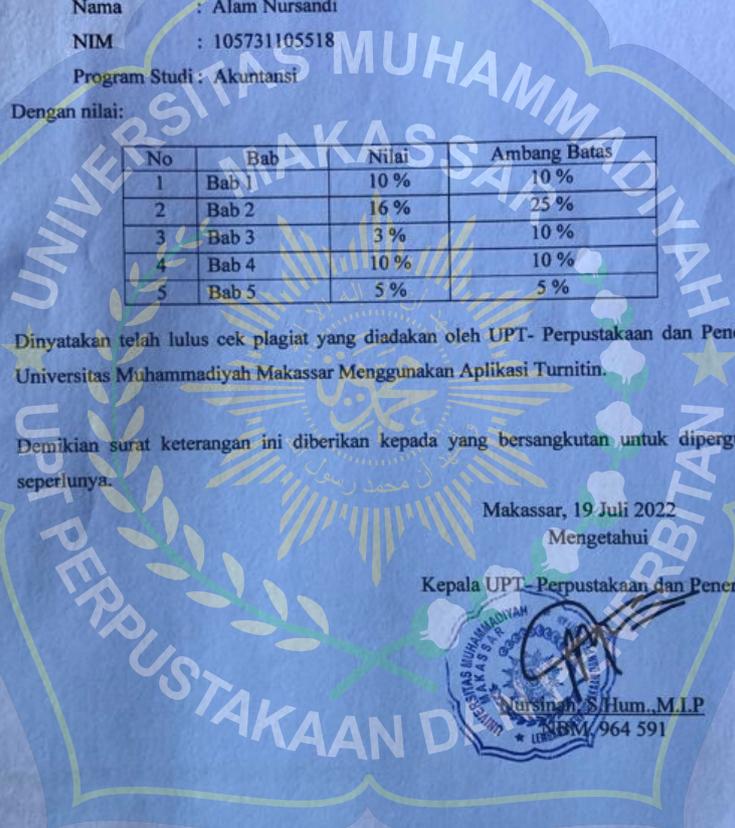
No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	16 %	25 %
3	Bab 3	3 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 19 Juli 2022  
 Mengetahui  
 Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan

  
 Nursandi, Hum., M.I.P.  
 NIM/ 964 591



Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222  
 Telepon (0411)866972,881 593, fax (0411)865 588  
 Website: www.library.unismuh.ac.id  
 E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

# BAB 1 Alam Nursandi

105731105518

by Tahap Tutup

**Submission date:** 19-Jul-2022 09:18AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1872418892

**File name:** SKRIPSI\_BAB\_I\_ALAM.docx (25,73K)

**Word count:** 944

**Character count:** 6448



## BAB 1 Alam Nursandi 105731105518

## ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

13%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	4%
2	Submitted to Politeknik Negeri Bandung Student Paper	2%
3	repository.upp.ac.id Internet Source	2%
4	Monica Valencia Putri, Rindu Rika G. Hidayati, Komaruddin Komaruddin, Fitra Dharma. "ANALISIS PENDAPATAN BERBASIS KAS DAN BERBASIS AKRUAL DALAM LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH", Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 2021 Publication	2%

Exclude quotes Exclude bibliography Exclude matches  < 2%

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR

PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

## BAB 2 Alam Nursandi

105731105518

by Tahap Tutup

**Submission date:** 19-Jul-2022 09:19AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1872419390

**File name:** SKRIPSI\_BAB\_II\_ALAM.docx (59,36K)

**Word count:** 2807

**Character count:** 19364

## BAB 2 Alam Nursandi 105731105518

## ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	journal.ubaya.ac.id Internet Source	3%
2	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	3%
3	eprints.ums.ac.id Internet Source	2%
4	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	2%
5	www.coursehero.com Internet Source	2%
6	id.wikipedia.org Internet Source	2%
7	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes Off

Exclude matches &lt; 2%

Exclude bibliography Off

# BAB 3 Alam Nursandi

## 105731105518

by Tahap Tutup

**Submission date:** 19-Jul-2022 09:20AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1872419566

**File name:** SKRIPSI\_BAB\_III\_ALAM.docx (20.3K)

**Word count:** 749

**Character count:** 4984

### BAB 3 Alam Nursandi 105731105518

ORIGINALITY REPORT

3%

SIMILARITY INDEX

3%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

2%

★ erepo.unud.ac.id

Internet Source

Exclude quotes

or

Exclude matches

Exclude bibliography

or



# BAB 4 Alam Nursandi

## 105731105518

by Tahap Tutup

**Submission date:** 19-Jul-2022 09:20AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1872419818

**File name:** SKRIPSI\_BAB\_IV\_ALAM.docx (308.69k)

**Word count:** 3538

**Character count:** 24159

BAB 4 Alam Nursandi 105731105518

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

5%

★ es.scribd.com

Internet Source

Exclude quotes

Exclude bibliography

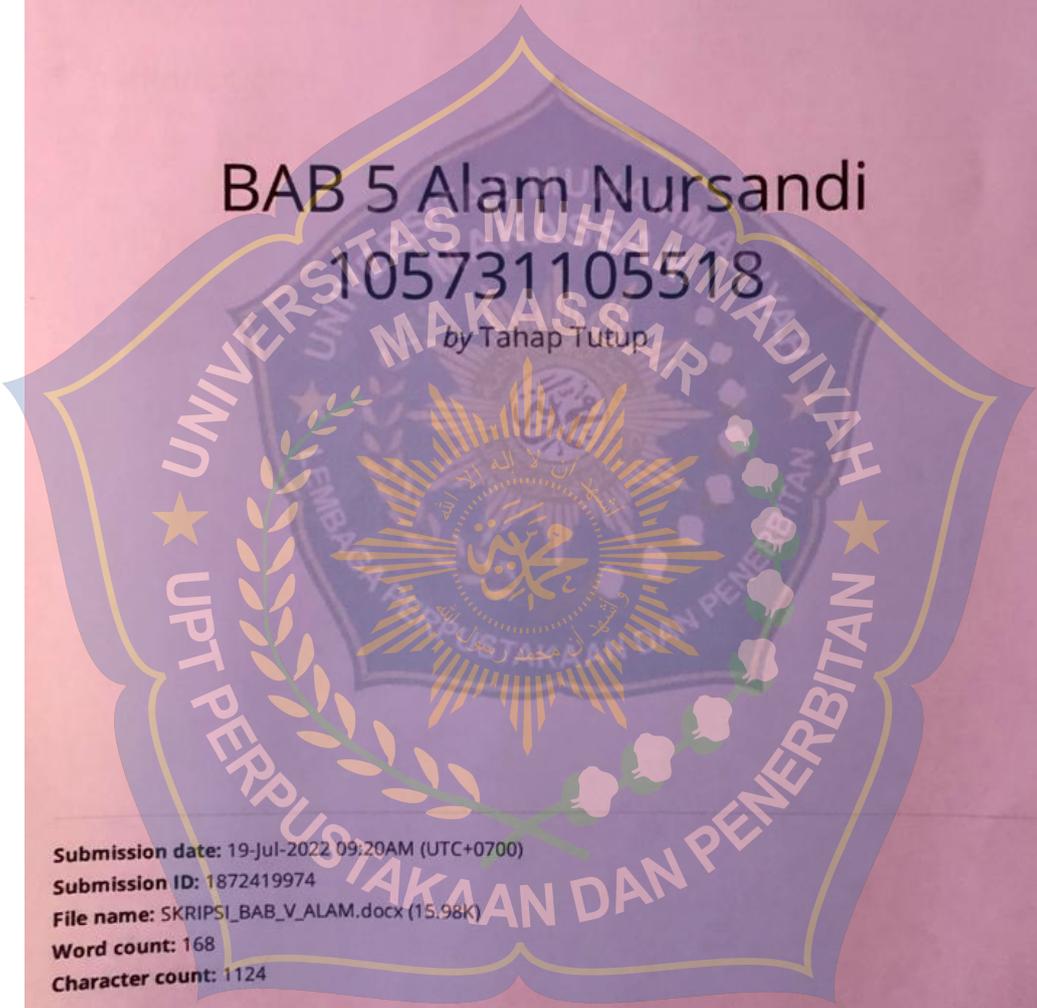
Exclude matches



# BAB 5 Alam Nursandi

105731105518

by Tahap Tutup



**Submission date:** 19-Jul-2022 09:20AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1872419974

**File name:** SKRIPSI\_BAB\_V\_ALAM.docx (15.98k)

**Word count:** 168

**Character count:** 1124

BAB 5 Alam Nursandi 105731105518

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

5%

★ mafiadoc.com

Internet Source

Exclude quotes

Off

Exclude matches

Exclude bibliography

Off



## BIOGRAFI PENULIS



**Alam Nursandi** panggilan Alam lahir di Bantaeng pada tanggal 05 Desember 2000 dari pasangan suami dan istri Bapak A. Abd Rahim dan (almh) Ibu Nurjannah. Peneliti adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Peneliti sekarang tinggal di jl. Andi Mannappiang Kelurahan Lamalaka Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan. Penulis pertama kali menempuh pendidikan formal pada tahun 2005 di TK/PAUD Perwanida, kemudian pada tahun 2006 melanjutkan pendidikan di SDN 10 Pasorongi kemudian pada tahun 2012 melanjutkan pendidikan di Mts Ma'arif Lasepang kemudian pada tahun 2015 melanjutkan pendidikan di MA Ma'arif Lasepang dan tamat pada tahun 2018. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Strata 1 (S1).